

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten

Pamekasan

a. Sejarah Singkat

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Pamekasan terletak di Jalan Slamet Riyadi No.5A 69313 0324322214 (DKPP). Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan sebelumnya bernama Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pamekasan yang pada awalnya mengampu urusan bidang pangan, pertanian, kelautan dan perikanan. Untuk urusan di bidang kelautan dan perikanan mulai 3 Januari 2022 menjadi kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pamekasan.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan. Berdasarkan peraturan daerah dan peraturan bupati tersebut telah dilaksanakan penataan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan urusan pemerintahan bidang pertanian yang disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik, potensi, dan kemampuan daerah untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pamekasan.

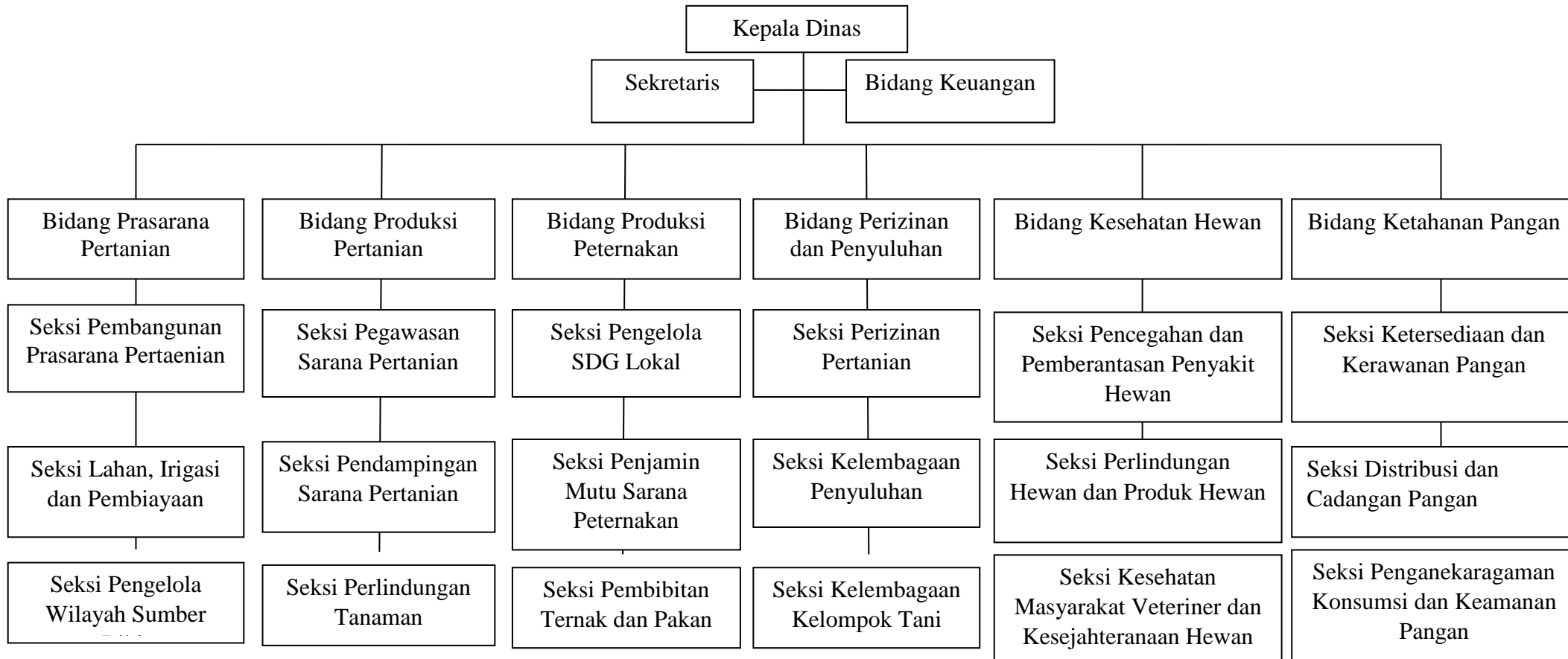
b. Visi dan Misi

- 1) Visi: “Pamekasan Sejahtera dari Bawah, Merata dan Berkelanjutan Berdasarkan Nilai-Nilai Agama”
- 2) Misi
 - a) Penguatan kualitas Sumber Daya Manusia;
 - b) Perekonomian Inklusif yang Bertumpu pada Sektor Pertanian dan Didukung Percepatan Pembangunan Sektor Industri, Perdagangan dan Sektor Potensial Lainnya;
 - c) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - d) Pemenuhan Kualitas Infrastruktur dasar yang Merata dan Berkelanjutan
 - e) Pengelolaan Potensi Sosial, Nilai-nilai Budaya, Keagamaan, Kepemudaan dan Perempuan untuk Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis serta Sejahtera.

c. Struktur Organisasi

Berikut merupakan struktur organisasi di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan:

Gambar 4.1
Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Pamekasan



Sumber: Struktur Organisasi Dinas Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Pamekasan (2023)

Berdasarkan gambar 4.1 terkait gambar struktur organisasi, berikut merupakan tugas pokok dan fungsi dari tiap jabatan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pamekasan:

1) Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas

- a) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan;
- b) Pengarahan dan pemanfaatan hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja;
- c) Pemberian rekomendasi perizinan bidang ketahanan pangan dan pertanian;
- d) Penilaian kinerja bawahan, pelaksanaan administrasi dinas dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2) Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

- a) Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan (asset), kearsipan, perpustakaan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat, dan keprotokolan, pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program, anggaran, perundang-undangan, monitoring, evaluasi, tata laksana, serta program kegiatan, pelaporan kinerja dan keuangan,
- b) Pelaksanaan koordinasi, reformasi birokrasi antar bidang, koordinasi penyelenggaraan ketatalaksanaan, pelayanan public antar bidang, koordinasi penyelenggaraan evaluasi kelembagaan antar bidang dan tugas antar bidang;
- c) Penyusunan laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan, keuangan, capaian reformasi birokrasi Dinas, rencana kerja, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Sekretariat, laporan evaluasi kinerja program

dan kegiatan, serapan anggaran dan capaian reformasi birokrasi Sekretariat dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

- d) Penilaian kinerja bawahan dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3) Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

- a) Melaksanakan tata usaha umum dan pimpinan, administrasi perjalanan dinas, urusan administrasi surat menyurat, pendistribusian surat, tata kearsipan, urusan rumah tangga, perlengkapan, dan inventaris, memelihara peralatan, keamanan, dan kebersihan kantor;
- b) Melaksanakan tugas bidang hubungan masyarakat dan keprotokolan, analisa kebutuhan dan pengadaan barang kebutuhan, tata usaha kepegawaian, pengembangan karier pegawai, serta pengelolaan dokumen kepegawaian;
- c) Menyusun bahan pembinaan kepegawaian, kelembagaan, dan ketatalaksanaan, laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, menilai kinerja bawahan dan tugas lain.

4) Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Pertanian

- a) Menyusun bahan pengoordinasian kegiatan perencanaan, monitoring, dan evaluasi, pelaporan kinerja, program, kegiatan dinas, perencanaan kinerja, program, kegiatan dinas, hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja, program, dan kegiatan dinas, laporan kinerja, program, dan kegiatan dinas;

- b) Menilai kinerja bawahan, menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan tugas lain yang di berikan oleh Sekretaris.

5) Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Keuangan dan Aset Pertanian

- a) Melaksanakan verifikasi dan akuntansi pengelolaan keuangan, pengelolaan dan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, pendataan dan pengelolaan asset;
- b) Menilai kinerja bawahan, menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran Sub Bagian Keuangan dan Aset, laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan asset dan tugas lain yang diberikan Sekretaris.

6) Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bidang Prasarana Pertanian

- a) Pengembangan dan pembangunan prasarana pertanian, potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian, penyusunan kebijakan, penyediaan dukungan infrastruktur pertanian, pengawasan, bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian, penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan investasi, pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan pertanian;
- b) Pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan, pengoordinasian kegiatan perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program dan kegiatan, supervisi dan pengarahan teknis program, kegiatan, analisis data dan informasi kinerja, penyusunan rencana kerja, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;

- c) Penilaian kinerja bawahan, menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

7) Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pembangunan Prasarana Pertanian

- a) Melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani, dam parit dan embung pertanian, pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani, long storage, pintu air, pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan balai serta sarana pendukungnya;
- b) Menyusun rencana dan anggaran pembangunan prasarana pertanian, laporan dan pendokumentasian kegiatan pembangunan prasarana pertanian; dan menyiapkan bahan rekomendasi perizinan;
- c) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, melaksanakan penyediaan, pengawasan dan penjaminan pembangunan prasarana pertanian;
- d) Menilai kinerja bawahan, menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan tugas lain.

8) Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan Pertanian

- a) Melaksanakan identifikasi, penetapan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan lahan pengembalaan umum, pengelolaan lahan pertanian, kawasan pertanian, lahan cadangan pertanian serta penyusunan peta lahan pertanian pangan berkelanjutan, koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung;

- b) Menyusun rencana, anggaran dan bahan kebijakan seksi bidang lahan, irigasi, pembiayaan, peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
- c) Menyiapkan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani, jaringan irigasi tersier, bahan pengembangan tata ruang, tata guna lahan pertanian, bahan bimbingan pemberdayaan pemakai air dan melaksanakan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi;
- d) Menyusun laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi lahan, irigasi dan pembiayaan, laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, menyiapkan bahan rekomendasi perizinan, menilai kinerja bawahan dan tugas lain.

9) Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pengelola Wilayah Sumber Bibit

- a) Melaksanakan pelestarian, pemanfaatan, pengawasan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun atau galur ternak;
- b) Menyusun rencana, anggaran, bahan kebijakan di bidang pengembangan pengelola wilayah sumber bibit, peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian wilayah sumber bibit, menyiapkan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna wilayah sumber bibit;
- c) Melaksanakan bimbingan, fasilitasi, pendampingan, supervise, menyusun laporan dan dokumentasi kegiatan seksi dan menyiapkan bahan rekomendasi perizinan;

- d) Menilai kinerja bawahan, menyusun laporan evaluasi kinerja program, kegiatan, serapan anggaran, menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan tugas lain.

10) Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Produksi Pertanian

- a) Pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Kabupaten, perumusan kebijakan pembenihan, produksi, perlindungan, pengolahan, pemasaran, rencana kebutuhan dan penyediaan, pengawasan mutu dan peredaran benih, pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang Produksi Pertanian;
- b) Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, bencana alam dan dampak perubahan iklim, pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran, pemberian ijin usaha;
- c) Pemantauan dan evaluasi, pengoordinasian pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian, supervisi dan pengarahan teknis pelaksanaan program dan kegiatan, analisis data dan informasi kinerja;
- d) Penyusunan rencana kerja, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan, laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, penilaian kinerja bawahan dan fungsi lain.

11) Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pengawasan Sarana Pertanian

- a) Melaksanakan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian, menyusun rencana, anggaran, bahan kebijakan, peta pengembangan,

menyiapkan bahan pengembangan, melaksanakan bimbingan dan fasilitasi, pendampingan dan supervise, laporan dan pendokumentasian kegiatan serta menyiapkan bahan rekomendasi perizinan;

- b) Menilai kinerja bawahan, menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan; dan tugas lain.

12) Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pendampingan Sarana Pertanian

- a) Melaksanakan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian, menyusun rencana dan anggaran, bahan kebijakan, peta pengembangan, menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan dan fasilitasi, melaksanakan pendampingan dan supervise, menyusun laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi Pengawasan Sarana Pertanian;
- b) Menyiapkan bahan rekomendasi perizinan, menilai kinerja bawahan, menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan tugas lain.

13) Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Perlindungan Tanaman

- a) Melaksanakan pengendalian, penanganan dampak perubahan iklim, pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, penanggulangan bencana non alam, penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;

- b) Menyusun rencana dan anggaran, bahan kebijakan, peta pengembangan perlindungan tanaman, laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan tugas lain.

14) Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Produksi Peternakan

- a) Pengelolaan dan peningkatan mutu sumber daya genetic hewan, tumbuhan, dan mikro organisme, pengawasan obat hewan, pengendalian, pengawasan penyediaan dan peredaran, penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten lain;
- b) Perumusan kebijakan, perlindungan dan pengolahan, rencana kebutuhan dan penyediaan, pengawasan mutu dan peredaran, pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi, pengendalian dan penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim, pemantauan dan evaluasi, pengoordinasian pelaksanaan kegiatan, supervisi dan pengarahan teknis pelaksanaan program dan kegiatan, nalisis data dan informasi kinerja, penyusunan rencana kerja, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- c) Penilaian kinerja bawahan, enyusunan laporan evaluasi kinerja program, kegiatan serta serapan anggaran, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan fungsi lain.

15) Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pengelola Sumber Daya Genetik Lokal

- a) Melaksanakan penjaminan kemurnian dan kelestarian, meningkatkan kualitas, melaksanakan pemanfaatan, menyusun rencana dan anggaran, menyusun

bahan kebijakan, peta pengembangan pengelola, menyiapkan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan, bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pengelola sumber daya genetik lokal, melaksanakan bimbingan, fasilitas dan pelayanan, pendampingan dan supervise di sumber daya genetik lokal;

- b) Menyusun laporan dan pendokumentasian kegiatan, menilai kinerja bawahan, menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan tugas lain.

16) Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Penjaminan Mutu Sarana Peternakan

- a) Melaksanakan pengawasan, penjaminan pengawasan peredaran, pengujian mutu dan sertifikasi benih/bibit ternak, pemeriksaan mutu, khasiat, dan keamanan peredaran obat hewan penindakan atas penyimpangan penyediaan dan peredaran obat hewan;
- b) Menyusun rencana dan anggaran, bahan kebijakan, peta pengembangan, bahan bimbingan pemberdayaan, bimbingan, fasilitasi dan pelayanan penjaminan mutu, pendampingan dan supervise, menyusun laporan dan pendokumentasian kegiatan, menyiapkan bahan rekomendasi perizinan;
- c) Menilai kinerja bawahan, menyusun laporan evaluasi kinerja program, kegiatan, serta serapan anggaran, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan tugas lain.

17) Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pembibitan Ternak dan Pakan

- a) Melaksanakan penjaminan mutu, pengendalian, pengawasan, pengadaan bibit, pengadaan hijauan pakan ternak;
- b) Menyusun rencana dan anggaran, bahan kebijakan, peta pengembangan, bahan bimbingan pemberdayaan, melaksanakan bimbingan, fasilitasi, pelayanan, pendampingan, supervise, menyusun laporan dan pendokumentasian kegiatan;
- c) Menilai kinerja bawahan, menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan tugas lain.

18) Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Perizinan dan Penyuluhan

- a) Penerbitan izin usaha pertanian, izin usaha produksi, izin usaha pengecer, penyuluhan pertanian dan perumusan kebijakan, perumusan rencana, pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi, pemberian izin usaha teknis, pemantauan dan evaluasi, pengoordinasian pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian, supervisi dan pengarahan teknis, analisis data dan informasi kinerja, penyusunan rencana kerja, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- b) Penilaian kinerja bawahan, penyusunan laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi lain.

19) Tugas Pokok Seksi Perizinan Pertanian

- a) Menyusun standar pelayanan public, melaksanakan penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis, pembinaan dan pengawasan izin usaha pertanian, penatausahaan penerbitan izin usaha, pengawasan pelaksanaan izin

usaha rumah sakit hewan, rumah potong hewan hingga pemenuhan dan pengawasan izin usaha pengecer obat hewan;

- b) Menyusun rencana dan anggaran, bahan kebijakan, bahan bimbingan, bimbingan, fasilitasi, dan pelayanan, pendampingan dan supervisi, melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan, menyusun laporan dan pendokumentasian kegiatan, menyiapkan bahan rekomendasi perizinan;
- c) Menilai kinerja bawahan, menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta anggaran, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan tugas lain.

20) Tugas Pokok Seksi Kelembagaan Penyuluhan

- a) Meningkatkan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa, melaksanakan penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana, sosialisasi peraturan perundang-undangan, menyusun rencana dan anggaran, bahan kebijakan, peta pengembangan, bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan penyuluhan, melaksanakan bimbingan, fasilitasi, pelayanan, pendampingan dan supervisi, menyusun laporan dan pendokumentasian, menyiapkan bahan rekomendasi perizinan;
- b) Menilai kinerja bawahan, menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan tugas lain.

21) Tugas Pokok Seksi Kelembagaan Kelompok Tani

- a) Mengembangkan kapasitas kelembagaan petani di Kecamatan dan desa, membentuk badan usaha milik petani, membentuk dan penyelenggaraan sekolah lapang, sosialisasi peraturan perundang-undangan, menyusun rencana dan anggaran, bahan kebijakan, peta pengembangan kelembagaan, menyiapkan bahan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan, pendampingan dan supervisi, menyusun laporan dan pendokumentasian kegiatan , menyiapkan bahan rekomendasi perizinan;
- b) Menilai kinerja bawahan, menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan tugas lain.

22) Tugas dan Fungsi Bidang Kesehatan Hewan

- a) Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit, pengawasan pemasukan dan pengeluaran, pengelolaan pelayanan, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis, perumusan kebijakan dan rencana kebutuhan, pemberian bimbingan, pemantauan dan evaluasi, pengoordinasian pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian program dan kegiatan, supervisi dan pengarahan teknis program dan kegiatan, analisis data dan informasi kinerja, penyusunan rencana kerja, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- b) Penilaian kinerja bawahan, laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran bidang kesehatan hewan, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan fungsi lain.

23) Tugas Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan

- a) Melaksanakan pengendalian dan penanggulangan penyakit, pembebasan penyakit hewan menular, menyediakan pelayanan, menyusun rencana dan anggaran, bahan kebijakan, peta pencegahan dan pemberantasan, bahan bimbingan, bimbingan, fasilitasi dan pelayanan, pendampingan dan supervisi, menyusun laporan dan pendokumentasian kegiatan dan menyiapkan rekomendasi perizinan;
- b) Menilai kinerja bawahan, menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan tugas lain.

24) Tugas Seksi Perlindungan Hewan dan Produk Hewan

- a) Melaksanakan penanggulangan daerah terdampak wabah penyakit hewan menular, penilaian resiko penyakit dan keamanan produk hewan, pengawasan atas penerpan persyaratan teknis, pemeriksaan kesehatan hewan dan produk hewan, menyusun rencana dan anggaran, bahan kebijakan, peta perlindungan, bahan bimbingan, bimbingan, fasilitasi dan pelayanan, pendampingan dan supervisi, laporan dan pendokumentasian kegiatan, bahan rekomendasi perizinan;
- b) Menilai kinerja bawahan, laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan tugas lain.

25) Tugas Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan

- a) Melaksanakan pendampingan, pengawasan peredaran hewan dan produk hewan, penetapan pemenuhan persyaratan teknis, pengujian laboratorium, pendampingan, penanganan atas pelanggaran, menyusun rencana dan anggaran, bahan kebijakan, peta masyarakat, bahan bimbingan, bimbingan, fasilitasi dan pelayanan, pendampingan dan supervisi, menyusun laporan dan pendokumentasian kegiatan, menyiapkan bahan rekomendasi perizinan;
- b) Menilai kinerja bawahan, menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan tugas lain.

26) Tugas dan Fungsi Bidang Ketahanan Pangan

- a) Penyediaan dan penyaluran pangan pokok, pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan, penentuan harga minimum daerah, pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan, peta kerentanan dan ketahanan, penanganan kerawanan pangan, pengawasan keamanan, pemantauan pengkajian kebijakan teknis dan fasilitasi, pelayanan dan pembinaan, pelaksanaan fasilitasi pengolahan, pemasaran, dan promosi, pemantauan dan pengkajian kebijakan teknis ketersediaan, distribusi, cadangan dan kewaspadaan pangan;
- b) Pelaksanaan fasilitasi ketersediaan, distribusi, cadangan, dan kewaspadaan pangan, perumusan kebijakan perumusan rencana kebutuhan, bimbingan penerapan peningkatan produksi, pemberian izin usaha, pengoordinasian pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian program, supervisi dan pengarahan teknis, analisis data dan

informasi kinerja, rencana kerja, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;

- c) Penilaian kinerja bawahan, penyusunan laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran, pemantauan evaluasi, penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan fungsi lain.

27) Tugas dan Fungsi Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

- a) Penyediaan informasi harga dan neraca bahan makanan, pemantauan stok, pasokan dan harga, penyusunan pemetakhiran, analisis peta, koordinasi dan sinkronisasi penanganan pangan, pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan, menyusun rencana anggaran, bahan kebijakan, peta ketersediaan dan kerawanan pangan, menyiopkan bahan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan informasi, pendampingan dan supervisi, menyusun laporan dan dokumentasi kegiatan, menyiapkan rekomendasi perizinan;
- b) Penilaian kinerja bawahan, menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan tugas lain.

28) Tugas dan Fungsi Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan

- a) Melaksanakan penyediaan pangan, koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan distribusi, pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi, pengembangan, koordinasi dan sinkronisasi pengendalian, penyusunan rencanan, pengadaan dan pemeliharaan cadangan, pengkajian teknis, pengendalian harga, fasilitas distribusi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan distribusi dan harga pangan, identifikasi dan pengkajian, pembinaan pengembangan lumbung pangan, analisis skor pola pangan harapan dan neraca

bahan makanan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan ketersediaan dan cadangan pangan;

- b) Menyusun rencana dan anggaran, bahan kebijakan, peta, menyiapkan bahan bimbingan, melaksanakan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan informasi, pendampingan dan supervise, menyusun laporan, dokumentasi kegiatan, menyiapkan bahan rekomendasi perizinan;
- c) Menilai kinerja bawahan, menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan tugas lain.

29) Tugas dan Fungsi Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

- a) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penentuan harga minimum, penyusunan dan penetapan target konsumsi, pemberdayaan masyarakat, koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi, penguatan kelembagaan keamanan pangan, sertifikasi keamanan, registrasi keamanan, rekomendasi keamanan, sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan, menyusun rencana dan anggaran, bahan kebijakan, peta penganekaragaman, menyiapkan bahan bimbingan, bimbingan, fasilitas dan pelayanan informasi, pendampingan dan supervise, menyusun laporan dan pendokumentasian kegiatan, menyiapkan bahan rekomendasi perizinan;
- b) Menilai kinerja bawahan, menyusun laporan evaluasi kinerja program dan kegiatan serta serapan anggaran, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan tugas lain.

2. Penerapan Partisipasi Anggaran dalam Meningkatkan Kinerja Manajerial di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan

Berkaitan dengan bagaimana penerapan partisipasi anggaran dalam meningkatkan kinerja manajerial di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan, peneliti melakukan wawancara pada Kepala Dinas, Sekretariat Dinas dan Bagian Keuangan. Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti melaksanakan wawancara mengenai bagaimana penerapan partisipasi anggaran dalam meningkatkan kinerja manajerial. Kepala Dinas yakni Ajib Abdullah memaparkan:

“Mengenai bagaimana penerapan partisipasi anggaran dalam meningkatkan kinerja manajerial tentunya saya selalu ikut serta ketika dalam proses penyusunan anggaran, saya juga merasa puas dalam penyusunan anggaran, kebutuhan serta kerelaan dalam memberikan sebuah pendapat sekaligus usulan penyusunan anggaran, kemudian saya sebagai atasan juga sering meminta pendapat pada saat penyusunan anggaran. Cara-cara tersebut merupakan hal yang perlu dilakukan dalam partisipasi anggaran untuk meningkatkan kinerja manajerial. Lebih singkatnya untuk meningkatkan kinerja manajerial dalam partisipasi anggaran tentunya saya dan para bawahan ikut serta dalam menyusun anggaran dan memberikan sebuah pendapat-pendapat kemudian juga mengusulkan sehingga nantinya bisa menciptakan sebuah kepuasan yang bisa dirasakan ketika penyusunan anggaran”.¹

Sekretariat Dinas yakni Ach. Hermanto Eka Wahyudi juga memberikan penjelasan yang sama mengenai bagaimana penerapan partisipasi anggaran dalam meningkatkan kinerja manajerial. Hasil wawancaranya yakni:

“Terkait bagaimana penerapan partisipasi anggaran dalam meningkatkan kinerja manajerial tentunya kami ikut berpartisipasi Atau ikut serta dalam penyusunan anggaran, kami juga memberikan pendapat, mengusulkan sebuah pendapat dalam penetapan anggaran final, atasan juga meminta pendapat ketika penyusunan anggaran dan tentunya kami memberikan usulan kepada atasan sehingga nantinya akan tercipta sebuah kepuasan yang dirasakan dalam penyusunan anggaran”.²

¹ Ajib Abdullah, Kepala Dinas. Wawancara Langsung, (1 April 2023).

² Ach. Hermanto Eka Wahyudi, Sekretariat Dinas, Wawancara Langsung, (1 April 2023).

Wawancara juga dilaksanakan pada Bagian Keuangan yakni Adelia Frizky Arista terkait bagaimana penerapan partisipasi anggaran dalam meningkatkan kinerja manajerial yang menjelaskan:

“Penerapan partisipasi anggaran dalam meningkatkan kinerja manajerial yakni saya serta lainnya ikut berpartisipasi dalam penyusunan anggaran dengan memberikan pendapat-pendapat, mengusulkan dalam penetapan anggaran final kemudian juga atasan meminta pendapat kepada saya dan lainnya ketika proses penyusunan anggaran sehingga kami bisa mengusulkan apa saja yang perlu menjadi anggaran sehingga kepuasan yang dirasakan dalam penyusunan anggaran akan tercapai”.³

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bisa dijelaskan bahwa untuk penerapan partisipasi anggaran dalam meningkatkan kinerja manajerial maka dilaksanakan dengan selalu ikut serta ketika proses penyusunan anggaran, merasa puas dalam penyusunan anggaran, kebutuhan serta kerelaan dalam memberikan sebuah pendapat sekaligus usulan penyusunan anggaran, serta atasan juga sering meminta pendapat pada saat penyusunan anggaran.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara terkait apakah anda ikut serta dalam penyusunan anggaran. Mengacu pada hasil perolehan wawancara tentunya bisa disimpulkan bahwa atasan serta bawahan ikut serta dalam penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran dibuat dengan sebagaimana mestinya (jujur), amanah, dapat dipertanggungjawabkan, dengan memperhatikan keadilan, kesejahteraan dan kebermanfaatannya. Dengan adanya keikutsertaan antara atasan dengan para bawahan dalam proses penyusunan anggaran akan menciptakan transparansi artinya keterbukaan mengenai anggaran yang disusun dan Dinas bisa akuntabel atau amanah, adil dalam mengalokasikan dan mendistribusikan anggaran untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebermanfaatannya serta dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, kepala Dinas, sekretariat dan bagian keuangan juga selalu mengawasi setiap proses dalam penyusunan

³ Adelia Frizky Arista, Bagian Keuangan, Wawancara Langsung, (1 April 2023).

anggaran ini. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kinerja manajerial. Kepala Dinas yakni Ajib Abdullah memaparkan:

“Iya tentu saja saya ikut serta, karena saya sebagai Kepala Dinas tentunya untuk menentukan sebuah perencanaan anggaran merupakan tugas saya, Kemudian saya juga ikut serta dalam menyusun anggaran dan mengevaluasi laporan laporan seputar anggaran. Sehingga berdasarkan hal tersebut tentunya saya selalu ikut serta dalam penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran ini dibuat dengan sebagaimana mestinya (jujur), amanah, dapat dipertanggungjawabkan, dengan memperhatikan keadilan, kesejahteraan dan kebermanfaatan. Dalam hal ini, dengan adanya keikutsertaan antara saya dengan para bawahan dalam proses penyusunan anggaran akan menciptakan transparansi artinya keterbukaan mengenai anggaran yang disusun dan kita bisa akuntabel atau amanah, adil dalam mengalokasikan dan mendistribusikan anggaran ini untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebermanfaatan serta dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, saya juga selalu mengawasi setiap proses dalam penyusunan anggaran ini”.⁴

Wawancara dengan pertanyaan yang sama juga peneliti lakukan pada Sekretariat Dinas terkait apakah anda ikut serta dalam penyusunan anggaran. Sekretariat Dinas Ach. Hermanto Eka Wahyudi menjelaskan:

“Iya, Saya selalu ikut serta dalam penyusunan anggaran, Itu bisa dilihat dari bagaimana saya ikut memberikan pendapat kemudian juga mengusulkan ketika proses penyusunan anggaran terhadap penetapan anggaran final kemudian atasan sering meminta pendapat saat penyusunan anggaran kepada saya. Penyusunan anggaran ini dibuat dengan sebagaimana mestinya (jujur), amanah, dapat dipertanggungjawabkan, dengan memperhatikan keadilan, kesejahteraan dan kebermanfaatan. Dalam hal ini, dengan adanya keikutsertaan antara saya dengan para bawahan dalam proses penyusunan anggaran akan menciptakan transparansi artinya keterbukaan mengenai anggaran yang disusun dan kita bisa akuntabel atau amanah, adil dalam mengalokasikan dan mendistribusikan anggaran ini untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebermanfaatan serta dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, saya dan atasan juga selalu mengawasi setiap proses dalam penyusunan anggaran ini”.⁵

Peneliti juga melakukan wawancara terkait apakah anda ikut serta dalam penyusunan anggaran. Bagian Keuangan yakni Adelia Frizky Arista menjelaskan:

“Iya, Saya selalu ikut serta dalam penyusunan anggaran karena saya itu bagian keuangan tentunya atasan akan meminta pendapat kepada saya sehingga

⁴ Ajib Abdullah, Kepala Dinas. Wawancara Langsung, (1 April 2023).

⁵ Ach. Hermanto Eka Wahyudi, Sekretariat Dinas, Wawancara Langsung, (1 April 2023).

berdasarkan hal tersebut saya akan memberikan sebuah pendapat saya berdasarkan kebutuhan dan kerelaan saya. Kemudian juga saya juga mengusulkan beberapa hal dalam proses penyusunan anggaran terhadap penetapan anggaran final. Dalam penyusunan anggaran ini dibuat dengan sebagaimana mestinya (jujur), amanah, dapat dipertanggungjawabkan, dengan memperhatikan keadilan, kesejahteraan dan kebermanfaatannya. Dalam hal ini, dengan adanya keikutsertaan antara saya dengan para bawahan dalam proses penyusunan anggaran akan menciptakan transparansi artinya keterbukaan mengenai anggaran yang disusun dan kita bisa akuntabel atau amanah, adil dalam mengalokasikan dan mendistribusikan anggaran ini untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebermanfaatannya serta dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, saya dan atasan juga selalu mengawasi setiap proses dalam penyusunan anggaran”.⁶

Kemudian, peneliti melakukan wawancara terkait bagaimana alasan yang diberikan oleh atasan ketika revisi yang dibuat apakah ada kepuasan yang dirasakan dalam penyusunan anggaran. Dari hasil wawancara didapatkan penjelasan bahwasanya, terdapat perasaan puas yang dirasakan pada saat revisi dalam penyusunan anggaran, karena atasan merasa puas dengan revisi revisi yang membuat target target bisa tercapai dengan baik. Adapun hasil wawancara pada Kepala Dinas yakni Ajib Abdullah yang memberi penjelasan:

“Tentunya ada rasa puas yang dirasakan ketika revisi yang dibuat dalam menyusun anggaran karena point pentingnya yakni target-target yang kita program dalam skala prioritas semuanya tercapai”.⁷

Wawancara dengan pertanyaan yang sama juga peneliti lakukan pada Sekretariat Dinas mengenai bagaimana alasan yang diberikan oleh atasan ketika revisi yang dibuat apakah ada kepuasan yang dirasakan dalam penyusunan anggaran. Sekretariat Dinas yakni Ach. Hermanto Eka Wahyudi memberi penjelasan:

“Sangat puas, karena dalam penyusunan anggaran ini mendapatkan sebuah tujuan-tujuan dan target-target yang menjadi skala prioritas yang nantinya akan dicapai. Kemudian dengan adanya partisipasi dalam penyusunan anggaran tersebut maka target tersebut bisa dicapai dengan maksimal”.⁸

⁶ Adelia Frizky Arista, Bagian Keuangan, Wawancara Langsung, (1 April 2023).

⁷ Ajib Abdullah, Kepala Dinas. Wawancara Langsung, (1 April 2023).

⁸ Ach. Hermanto Eka Wahyudi, Sekretariat Dinas, Wawancara Langsung, (1 April 2023).

Wawancara juga dilakukan pada Bagian Keuangan mengenai bagaimana alasan yang diberikan oleh atasan ketika revisi yang dibuat apakah ada kepuasan yang dirasakan dalam penyusunan anggaran. Bagian Keuangan yakni Adelia Frizky Arista memberi penjelasan:

“Kepuasan tentunya bisa dirasakan karena dalam penyusunan anggaran ini alasan-alasan yang diberikan oleh atasan yakni sejauh ini selalu merasa puas karena kami semua berpartisipasi dalam penyusunan anggaran sehingga dengan adanya hal tersebut membuat target-target yang menjadi skala prioritas dalam program-program kami bisa tercapai dengan baik”.⁹

Peneliti melakukan wawancara pada Kepala Dinas terkait apakah anda selalu mengemukakan pendapat atau saran dalam penyusunan anggaran. Kepala Dinas yakni Ajib Abdullah mengemukakan:

“Iya karena dalam menyusun anggaran kita harus mengakomodir kepentingan program prioritas dan aspirasi dari beberapa bawahan. Tentunya saya selalu mengemukakan pendapat pendapat ataupun saran dalam penyusunan anggaran karena hal itu merupakan hal yang penting”.¹⁰

Wawancara juga dilakukan pada Sekretariat Dinas terkait apakah anda selalu mengemukakan pendapat atau saran dalam penyusunan anggaran. Sekretariat Dinas yakni Ach. Hermanto Eka Wahyudi mengemukakan:

“Saya selalu berpartisipasi dalam mengemukakan pendapat ataupun sarang ketika penyusunan anggaran. Partisipasi dalam penyusunan anggaran ini merupakan hal yang penting agar target yang disusun atau dibuat bisa tercapai dengan maksimal”.¹¹

Wawancara juga dilakukan pada Bagian Keuangan mengenai apakah anda selalu mengemukakan pendapat atau saran dalam penyusunan anggaran. Bagian Keuangan yakni Adelia Frizky Arista mengemukakan:

“Ketika proses penyusunan anggaran tentunya saya ikut memberikan pendapat ataupun saran mengenai penyusunan anggaran. Seperti misalnya berapa anggaran

⁹ Adelia Frizky Arista, Bagian Keuangan, Wawancara Langsung, (1 April 2023).

¹⁰ Ajib Abdullah, Kepala Dinas. Wawancara Langsung, (1 April 2023).

¹¹ Ach. Hermanto Eka Wahyudi, Sekretariat Dinas, Wawancara Langsung, (1 April 2023).

yang perlu dikeluarkan untuk keperluan ini atau untuk keperluan lainnya dan tentunya hal itu bisa menjadi pertimbangan dalam proses penyusunan anggaran”.¹²

Dari hasil wawancara di atas bisa disimpulkan bahwa pada saat proses penyusunan anggaran atasan serta bawahan ikut serta memberikan pendapat ataupun saran terkait penyusunan anggaran. Pendapat serta saran yang mereka lakukan memang sangat penting untuk bisa menjadi bahan pertimbangan dalam proses penyusunan anggaran. Tentunya adanya ikut serta memberikan pendapat maka kinerja manajerial akan mengalami peningkatan.

Peneliti melakukan wawancara pada Kepala Dinas yakni Ajib Abdullah terkait apakah anda selalu menyatakan kerelaan dalam memberikan pendapat dalam penyusunan anggaran.

“Iya tentunya saya selalu menyatakan kerelaan dalam memberikan pendapat ketika penyusunan anggaran. Karena anggaran yang kita susun tentunya harus sesuai dan selaras dengan tujuan dan sasaran dan saya selalu menyatakan kerelaan saya terkait penyusunan anggaran tersebut”.¹³

Wawancara juga dilakukan kepada bagian Sekretariat Dinas yakni Ach. Hermanto Eka Wahyudi dengan pertanyaan apakah anda selalu menyatakan kerelaan dalam memberikan pendapat dalam penyusunan anggaran. Sekretariat Dinas menjelaskan:

“Saya selalu menyatakan kerelaan dalam memberikan pendapat pada saat penyusunan anggaran. Hal ini menjadi hal yang penting karena saya selalu berpartisipasi atau memberikan pendapat ketika anggaran disusun tanpa adanya paksaan dari pihak lain”.¹⁴

Peneliti juga melaksanakan wawancara pada Bagian Keuangan mengenai apakah anda selalu menyatakan kerelaan dalam memberikan pendapat dalam penyusunan anggaran. Bagian Keuangan yakni Adelia Frizky Arista memaparkan:

“Tentunya saya selalu memaparkan ataupun menyatakan kerelaan ketika memberikan sebuah pendapat pada saat penyusunan anggaran, hal ini berdasarkan inisiatif diri saya sendiri dalam hal ini untuk memberi sebuah pendapat pendapat

¹² Adelia Frizky Arista, Bagian Keuangan, Wawancara Langsung, (1 April 2023).

¹³ Ajib Abdullah, Kepala Dinas. Wawancara Langsung, (1 April 2023).

¹⁴ Ach. Hermanto Eka Wahyudi, Sekretariat Dinas, Wawancara Langsung, (1 April 2023).

yang menurut saya perlu menjadi pertimbangan ketika menyusun sebuah anggaran”.¹⁵

Mengacu pada hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti maka bisa disimpulkan bahwa atasan serta bawahan selalu menyatakan kerelaan mereka dalam memberikan sebuah pendapat pada saat penyusunan anggaran. Kerelaan dalam memberikan sebuah pendapat memang berasal dari diri mereka sendiri atau berdasarkan inisiatif diri mereka sendiri untuk memberikan sebuah pendapat pendapat yang diperlukan untuk bahan pertimbangan proses penyusunan anggaran.

Peneliti melakukan wawancara pada Kepala Dinas terkait apakah anda selalu mengusulkan sebuah pemikiran pada proses penyusunan anggaran terhadap penetapan anggaran final. Kepala Dinas yakni Ajib Abdullah memberi pemaparan:

“Iya karena ketika dalam proses penyusunan anggaran saya selalu mengusulkan beberapa pemikiran pemikiran yang dianggap penting terhadap penetapan anggaran final. Anggaran yang disusun tersebut harus mendukung dari adanya tujuan dan sasaran Dinas yang berorientasi kepada masyarakat dan kelompok tani”.¹⁶

Wawancara juga dilakukan kepada bagian Sekretariat Dinas dengan pertanyaan apakah anda selalu mengusulkan sebuah pemikiran pada proses penyusunan anggaran terhadap penetapan anggaran final. Sekretariat Dinas yakni Ach. Hermanto Eka Wahyudi memberi pemaparan:

“Tentu saja saya selalu mengusulkan sebuah pemikiran pada saat proses penyusunan anggaran terhadap penetapan anggaran final karena hal ini menjadi hal yang penting dalam anggaran. Dalam hal ini saya biasanya mengusulkan sebuah pemikiran pemikiran yang menurut saya penting ketika proses penyusunan anggaran seperti misalnya nominal yang perlu dikeluarkan kemudian apa saja yang memang menjadi sekala prioritas dalam penetapan anggaran tersebut”.¹⁷

Peneliti juga melaksanakan wawancara pada Bagian Keuangan mengenai apakah anda selalu mengusulkan sebuah pemikiran pada proses penyusunan anggaran terhadap penetapan anggaran final. Bagian Keuangan yakni Adelia Frizky Arista menjelaskan:

¹⁵ Adelia Frizky Arista, Bagian Keuangan, Wawancara Langsung, (1 April 2023).

¹⁶ Ajib Abdullah, Kepala Dinas. Wawancara Langsung, (1 April 2023).

¹⁷ Ach. Hermanto Eka Wahyudi, Sekretariat Dinas, Wawancara Langsung, (1 April 2023).

“Ketika proses penyusunan anggaran terhadap penetapan anggaran final tentunya saya selalu mengusulkan sebuah pemikiran seperti misalnya apa saja anggaran yang perlu dikeluarkan dan apa saja yang tidak perlu. Tentunya penyusunan anggaran ini harus disusun dengan mendukung dari tujuan dan sasaran Dinas”.¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara bisa disimpulkan bahwa pada saat proses penyusunan anggaran pada penetapan anggaran final atasan serta bawahan selalu mengusulkan sebuah pemikiran berupa pendapat-pendapat yang diperlukan. Seperti misalnya anggaran apa saja yang perlu diprioritaskan dan apa saja yang tidak perlu.

Peneliti melaksanakan wawancara pada Kepala Dinas mengenai apakah anda sebagai atasan meminta pendapat saat anggaran disusun. Kepala Dinas yakni Ajib Abdullah memaparkan:

“Iya saya sebagai atasan tentunya akan meminta pendapat pada bawahan mengenai proses penyusunan anggaran supaya mereka ikut berpartisipasi dan mengemukakan serta mengusulkan beberapa pendapat yang mereka dianggap perlu untuk diusulkan”.¹⁹

Wawancara juga dilakukan pada Sekretariat Dinas terkait apakah anda sering dimintai pendapat dari atasan yang meminta pendapat saat anggaran disusun. Sekretariat Dinas yakni Ach. Hermanto Eka Wahyudi menjelaskan:

“Iya, Saya selalu meminta pendapat atau atasan sering meminta pendapat kepada saya pada saat proses anggaran disusun. Hal tersebut beliau lakukan supaya saya serta lainnya bisa ikut berpartisipasi dalam memberikan pendapat atau mengusulkan sebuah pendapat terkait dengan penyusunan anggaran”.²⁰

Peneliti juga melaksanakan wawancara pada Bagian Keuangan mengenai apakah anda sering dimintai pendapat dari atasan yang meminta pendapat saat anggaran disusun. Bagian Keuangan yakni Adelia Frizky Arista memaparkan:

“Saya sebagai bagian keuangan tentunya sering dimintai pendapat dari atasan pada saat anggaran disusun hal tersebut seperti misalnya berkaitan dengan berapakah besarnya nominal yang perlu dikeluarkan atau perlu dianggarkan karena hal ini

¹⁸ Adelia Frizky Arista, Bagian Keuangan, Wawancara Langsung, (1 April 2023).

¹⁹ Ajib Abdullah, Kepala Dinas. Wawancara Langsung, (1 April 2023).

²⁰ Ach. Hermanto Eka Wahyudi, Sekretariat Dinas, Wawancara Langsung, (1 April 2023).

merupakan hal yang penting dalam proses penyusunan anggaran atau apa saja yang perlu dianggarkan”.²¹

Mengacu pada hasil yang wawancara bisa dikatakan bahwa sebagai atasan sering meminta pendapat pada bagian bawahan saat anggaran disusun. Kemudian sebagai bawahan juga sering dimintai oleh atasan pada saat penyusunan anggaran. Hal tersebut dilakukan supaya semua anggota organisasi ikut berpartisipasi dalam penyusunan anggaran serta mengemukakan pendapat-pendapat mereka dalam penyusunan anggaran.

Peneliti melaksanakan wawancara pada Kepala Dinas mengenai apakah penerapan partisipasi anggaran bisa meningkatkan kinerja manajerial. Kepala Dinas yakni Ajib Abdullah menjelaskan:

“Iya, tentu saja dengan adanya penerapan partisipasi anggaran bisa memberikan peningkatan pada kinerja manajerial. Dengan partisipasi anggaran ini beberapa program yang sudah dibuat sebelumnya bisa tercapai berdasarkan tujuan yang sudah ditetapkan dalam artian bisa efektif dan efisien”.²²

Wawancara juga dilakukan pada Sekretariat Dinas terkait apakah penerapan partisipasi anggaran bisa meningkatkan kinerja manajerial. Sekretariat Dinas yakni Ach. Hermanto Eka Wahyudi menjelaskan:

“Adanya penerapan partisipasi anggaran bisa meningkatkan kinerja manajerial. Dengan adanya partisipasi anggaran yakni sebuah anggaran yang disusun dengan adanya kerjasama dan partisipasi penuh dalam proses penyusunan anggaran maka akan membuat kinerja manajerial menjadi meningkat”.²³

Wawancara dengan pertanyaan yang sama mengenai apakah penerapan partisipasi anggaran bisa meningkatkan kinerja manajerial dilakukan pada Bagian Keuangan yakni Adelia Frizky Arista yang memaparkan:

²¹ Adelia Frizky Arista, Bagian Keuangan, Wawancara Langsung, (1 April 2023).

²² Ajib Abdullah, Kepala Dinas. Wawancara Langsung, (1 April 2023).

²³ Ach. Hermanto Eka Wahyudi, Sekretariat Dinas, Wawancara Langsung, (1 April 2023).

“Iya dengan menerapkan partisipasi anggaran yang bisa dikatakan sebuah proses individu yang mereka ikut terlibat dan memiliki pengaruh dalam penyusunan anggaran akan membuat kinerja manajerial semakin meningkat”.²⁴

Berdasarkan hasil wawancara, bisa disimpulkan bahwasanya dengan adanya penerapan partisipasi anggaran maka kinerja manajerial akan meningkat. Dengan adanya Partisipasi keseluruhan anggota organisasi dalam sebuah penyusunan anggaran maka akan menyebabkan kinerja manajerial meningkat.

3. Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban dalam Meningkatkan Kinerja Manajerial di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan

Berkenaan dengan bagaimana penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam meningkatkan kinerja manajerial di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan, peneliti melakukan wawancara pada Kepala Dinas, Sekretariat Dinas dan Bagian Keuangan. Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti melaksanakan wawancara pada Kepala Dinas mengenai bagaimana penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam meningkatkan kinerja manajerial. Kepala Dinas yakni Ajib Abdullah memberi penjelasan:

“Dalam penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam meningkatkan kinerja manajerial tentunya harus ada sebuah struktur organisasi yang jelas dengan memberikan gambaran terkait aliran tanggung jawab kemudian wewenang hingga posisi setiap unit tersebut, tentunya hal tersebut perlu dilakukan untuk bisa mengetahui gambaran pembagian tugas yang jelas. Kemudian dari sisi anggaran, tiap pusat memiliki tanggung jawab untuk ikut terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Penggolongan biaya juga perlu dilakukan dalam akuntansi pertanggungjawaban”.²⁵

Wawancara juga dilakukan pada Sekretariat Dinas terkait bagaimana penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam meningkatkan kinerja manajerial. Sekretariat Dinas yakni Ach. Hermanto Eka Wahyudi memaparkan:

²⁴ Adelia Frizky Arista, Bagian Keuangan, Wawancara Langsung, (1 April 2023).

²⁵ Ajib Abdullah, Kepala Dinas. Wawancara Langsung, (1 April 2023).

“Untuk meningkatkan kinerja manajerial tentunya perlu adanya penerapan akuntansi pertanggungjawaban yang bisa dilakukan dengan membuat struktur organisasi yang jelas kemudian berpartisipasi dalam proses penyusunan anggaran dan penggolongan biaya”.²⁶

Wawancara dengan pertanyaan yang sama mengenai bagaimana penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam meningkatkan kinerja manajerial Bagian Keuangan yakni Adelia Frizky Arista yang memaparkan:

“Penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam meningkatkan kinerja manajerial bisa ditempuh dengan beberapa cara yakni membuat struktur organisasi yang jelas agar bisa menunjukkan apa saja yang menjadi tanggung jawab hingga wewenang dan posisi setiap unit agar tugas yang mereka emban bisa diketahui dengan jelas, dalam proses penyusunan anggaran tentunya semua harus berpartisipasi, Kemudian perlu adanya penggolongan biaya yakni berbentuk biaya terkendali dan biaya tidak terkendali”.²⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa penerapan akuntansi pertanggungjawaban untuk meningkatkan kinerja manajerial bisa dilaksanakan dengan membuat struktur organisasi yang jelas supaya bisa menunjukkan apa saja yang menjadi tanggung jawab wewenang serta posisi tiap unit supaya tugas yang di emban dapat dengan jelas diketahui pada proses penyusunan anggaran seluruh individu yang terdapat dalam organisasi harus berpartisipasi, kemudian perlu adanya penggolongan biaya terkendali serta tidak terkendali.

Peneliti melakukan wawancara pada Kepala Dinas mengenai apakah dalam struktur organisasi perusahaan anda sudah ditentukan dengan jelas batas wewenang dan tanggung jawab dari tiap pimpinan, apakah anda setuju mengenai pengelompokan karyawan berdasarkan unit organisasi berdasarkan keahlian para karyawan, sebagai pimpinan apakah anda mengetahui dengan jelas pembagian tugas tahunan hingga tanggung jawab yang di emban. Kepala Dinas ialah Ajib Abdullah menjelaskan:

“Tentunya struktur organisasi sudah ditentukan dengan jelas mengenai batas wewenang dan tanggung jawab tiap bidang. Dan kemudian saya sangat setuju

²⁶ Ach. Hermanto Eka Wahyudi, Sekretariat Dinas, Wawancara Langsung, (1 April 2023).

²⁷ Adelia Frizky Arista, Bagian Keuangan, Wawancara Langsung, (1 April 2023).

mengenai pengelompokan karyawan berdasarkan unit organisasi dari sisi keahlian para karyawan. Dan saya sebagai pimpinan tentunya mengetahui dengan jelas pembagian tugas sehingga tanggung jawab yang di emban. Adapun tugas pokok dan fungsi dari setiap karyawan terletak pada peraturan Bupati nomor 11 tahun 2021 yang di dalamnya sudah membuat tugas masing-masing aparat”.²⁸

Wawancara juga dilakukan pada Sekretariat Dinas dengan pertanyaan yang sama dengan apa yang ditanyakan pada Kepala Dinas. Sekretariat Dinas yakni Ach. Hermanto Eka Wahyudi menjelaskan:

“Struktur organisasi di dinas sudah ditentukan dengan jelas terkait tanggung jawab dan wewenangnya kemudian juga saya menyetujui dengan adanya pengelompokan karyawan berdasarkan unit organisasi dari sisi keahlian para karyawan kemudian saya juga mengetahui dengan jelas tugas dan tanggung jawab saya”.²⁹

Peneliti juga melakukan wawancara yang sama pada Bagian Keuangan mengenai struktur organisasi seperti apa yang sudah peneliti tanyakan pada Kepala Dinas dan Sekretariat Dinas. Bagian Keuangan yakni Adelia Frizky Arista menjelaskan:

“Dinas tentunya sudah ada struktur organisasi dan sudah jelas sekali mengenai batas wewenang dan tanggung jawab tiap aparat kemudian juga saya sangat setuju terkait pengelompokan karyawan dari sisi keahlian Karyawan pada unit organisasi dan tentunya saya sudah mengetahui dengan jelas pembagian tugas hingga tanggung jawab saya”.³⁰

Dari hasil wawancara bisa disimpulkan bahwasanya, struktur organisasi sudah ditentukan dengan jelas batas wewenang serta tanggung jawab tiap bidang. Kemudian, dilakukan pengelompokan karyawan berdasarkan unit organisasi dari sisi keahlian para karyawan. Pimpinan di Dinas juga sudah mengetahui dengan jelas pembagian tugas tanggung jawab yang di emban. Dimana, tugas pokok dan fungsi dari setiap karyawan terletak pada peraturan Bupati nomor 11 tahun 2021.

²⁸ Ajjib Abdullah, Kepala Dinas. Wawancara Langsung, (1 April 2023).

²⁹ Ach. Hermanto Eka Wahyudi, Sekretariat Dinas, Wawancara Langsung, (1 April 2023).

³⁰ Adelia Frizky Arista, Bagian Keuangan, Wawancara Langsung, (1 April 2023).

Peneliti melaksanakan wawancara pada Kepala Dinas mengenai apakah dalam proses penyusunan anggaran sudah didasarkan pada pusat pertanggungjawaban, apakah setiap sub bagian pertanggungjawaban berperan serta dalam penyusunan anggaran yang nantinya bisa membantu perencanaan, dan apakah setiap penyiapan anggaran yang terjadi harus dilaporkan dan kemudian apakah dalam mengevaluasi anggaran dilakukan perbandingan antara anggaran dan realisasinya. Kepala Dinas yakni Ajib Abdullah menjelaskan:

“Tentunya dalam proses penyusunan anggaran sudah berdasarkan pada pusat pertanggungjawaban dan setiap sub bagian berperan dalam penyusunan anggaran yang nantinya bisa membantu proses perencanaan dan kemudian dilaporkan. Laporan tersebut dilaporkan dengan memaparkan apa adanya dan teliti, yaitu kami berusaha menerapkan sifat jujur dan amanah dalam menyampaikan semua informasi dan keterangan terkait anggaran berdasarkan fakta yang ada tanpa adanya pemalsuan data, penipuan ataupun pembodohan publik. Karena pada dasarnya pertanggungjawaban kami bukan hanya kepada pemerintah saja tapi kepada Allah yang Maha mengetahui atas segala sesuatu. Kemudian laporan dan evaluasi tersebut dilakukan tiap bulan baik serapan anggaran dan pertanggungjawaban sejauh mana perbandingan antara anggaran dan realisasi tersebut”.³¹

Wawancara juga dilakukan pada Sekretariat Dinas terkait dengan pertanyaan yang samaseperti apa yang penili tanyakan pada Kepala Dinas terkait penyusunan anggaran dalam akuntansi pertanggungjawaban. Sekretariat Dinas ialah Ach. Hermanto Eka Wahyudi menjelaskan:

“Anggaran yang disusun sudah berdasarkan pada pusat pertanggungjawaban kemudian setiap sub bagian pertanggungjawaban memiliki peran dalam penyusunan anggaran yang bisa memberi bantuan pada saat proses perencanaan. Setiap proses anggaran yang disiapkan dan terjadi adanya harus dilaporkan dan kemudian dilakukan evaluasi untuk membandingkan antara anggaran dan realisasi anggaran. Laporan tersebut dilaporkan dengan memaparkan apa adanya dan teliti, yaitu kami selalu berusaha menerapkan sifat jujur dan amanah dalam memaparkan informasi dan keterangan seputar anggaran berdasarkan fakta tanpa adanya pemalsuan data, penipuan ataupun pembodohan publik. Seperti yang dipaparkan pak Ajib mbak, pada dasarnya pertanggungjawaban kami bukan hanya kepada pemerintah saja tapi kepada Allah yang Maha mengetahui atas segala sesuatu”.³²

³¹ Ajib Abdullah, Kepala Dinas. Wawancara Langsung, (1 April 2023).

³² Ach. Hermanto Eka Wahyudi, Sekretariat Dinas, Wawancara Langsung, (1 April 2023).

Wawancara juga dilakukan pada Bagian Keuangan mengenai pertanyaan yang sama seperti apa yang peneliti tanyakan pada Kepala Dinas dan Sekretariat Dinas terkait penyusunan anggaran dalam akuntansi pertanggungjawaban. Bagian Keuangan yakni Adelia Frizky Arista menjelaskan:

“Proses anggaran yang disusun telah berdasar pada pusat pertanggungjawaban, setiap sub bagian pertanggungjawaban punya peran dalam penyusunan anggaran yang bisa memberi bantuan ketika proses perencanaan. Setiap proses anggaran yang disiapkan dan terjadi harus dilaporkan dan kemudian dilakukan evaluasi untuk membandingkan antara anggaran dan realisasi anggaran tersebut. Laporan penyusunan anggaran dilaporkan dengan memaparkan sebagaimana mestinya dan teliti yaitu kami selalu berusaha menerapkan sifat jujur dan amanah dalam memaparkan informasi dan keterangan mengenai anggaran berdasarkan fakta tanpa adanya pemalsuan data, penipuan ataupun pembodohan publik. Seperti yang dipaparkan pak Ajib dan pak Herman mbak, pada dasarnya pertanggungjawaban kami bukan hanya kepada pemerintah tapi kepada Allah yang Maha mengetahui”.³³

Mengacu pada hasil wawancara diatas, bisa disimpulkan bahwasanya dalam proses penyusunan anggaran tentunya sudah berdasarkan pada pusat pertanggungjawaban dan setiap sub bagian berperan dalam penyusunan anggaran yang nantinya bisa membantu proses perencanaan yang selanjutnya dilaporkan. Laporan tersebut dilaporkan dengan sebenar-benarnya dan teliti, yaitu Dinas selalu berusaha menerapkan sifat jujur dan amanah dalam menyampaikan semua informasi dan keterangan terkait anggaran berdasarkan fakta yang ada tanpa adanya pemalsuan data, penipuan ataupun pembodohan publik. Karena pada dasarnya pertanggungjawaban bukan hanya kepada pemerintah saja tapi kepada Allah yang Maha mengetahui atas segala sesuatu. Kemudian laporan tersebut akan dievaluasi setiap bulan baik serapan anggaran dan pertanggungjawaban sejauh mana perbandingan antara anggaran dan realisasi tersebut.

Peneliti melaksanakan wawancara mengenai apakah Dinas Ketahanan Pertanian Kabupaten Pamekasan sudah melakukan penggolongan biaya kendali dan tidak terkendali, dan apakah ada

³³ Adelia Frizky Arista, Bagian Keuangan, Wawancara Langsung, (1 April 2023).

sistem pelaporan biaya yang bertanggung jawab dan didalamnya pelaporan pertanggungjawaban tersebut berisi informasi biaya yang dianggarkan dan biaya yang terjadi sesungguhnya yang kemudian akan melakukan analisa dan evaluasi laporan pertanggungjawaban tersebut secara berkala dan rutin. Berdasarkan hasil wawancara dipaparkan bahwa dinas sudah melaksanakan penggolongan biaya kendali dan tidak terkendali, Adanya sistem pelaporan biaya yang bertanggung jawab yang mana dalam pelaporan pertanggungjawaban tersebut membuat informasi biaya yang dianggarkan serta realisasi anggaran yang selanjutnya akan dilaksanakan analisa serta evaluasi laporan pertanggungjawaban secara berkala sebentar rutin setiap bulan.

Adapun hasil wawancara pada Kepala Dinas ialah Ajib Abdullah yakni:

“Tentunya Dinas udah melakukan penggolongan biaya kendali seperti biaya komisi untuk jasa dan biaya tidak terkendali seperti gaji kemudian biaya pelatihan, Kemudian juga sudah ada sistem pelaporan biaya yang bertanggung jawab dan di dalamnya pelaporan pertanggungjawaban tersebut membuat informasi biaya yang dianggarkan kemudian yang terjadi sesungguhnya dan selanjutnya saya akan melakukan analisa dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban tersebut secara rutin dan berkala. Setiap bulan tentunya kita ada laporan realisasi fisik dan keuangan di mana target sasaran ditentukan pada awal tahun”.³⁴

Wawancara juga dilakukan pada Sekretariat Dinas terkait terkait dengan pertanyaan yang sama seperti apa yang peneliti tanyakan pada Kepala Dinas terkait penggolongan biaya terkendali dan tidak terkendali. Sekretariat Dinas yaitu Ach. Hermanto Eka Wahyudi menjelaskan:

“Biaya terkendali dan tidak terkendali sudah digolongkan kemudian di dalamnya juga ada pelaporan biaya pertanggungjawaban yang mana pelaporan pertanggungjawaban tersebut memuat informasi biaya yang dianggarkan dan realisasi yang ada kemudian atasan akan melakukan analisa serta evaluasi laporan pertanggungjawaban secara rutin dan berkala tiap bulan”.³⁵

Peneliti juga melakukan wawancara pada Bagian Keuangan mengenai pertanyaan yang sama seperti apa yang peneliti tanyakan pada Kepala Dinas dan Sekteraiat Dinas terkait

³⁴ Ajib Abdullah, Kepala Dinas. Wawancara Langsung, (1 April 2023).

³⁵ Ach. Hermanto Eka Wahyudi, Sekretariat Dinas, Wawancara Langsung, (1 April 2023).

penggolongan biaya terkendali dan tidak terkendali. Bagian Keuangan yakni Adelia Frizky Arista menjelaskan:

“Penggolongan biaya baik itu biaya terkendali dan tidak terkendali sudah digolongkan kemudian juga ada sistem pelaporan biaya yang bertanggung jawab dan pada laporan pertanggungjawaban tersebut memuat informasi biaya yang menjadi anggaran dan juga biaya yang terealisasi dan selanjutnya hal tersebut akan dilakukan analisa dan evaluasi laporan pertanggungjawaban secara rutin dan berkala setiap bulannya”.³⁶

Peneliti melaksanakan wawancara pada Kepala Dinas mengenai apakah penerapan akuntansi pertanggungjawaban bisa meningkatkan kinerja manajerial. Kepala Dinas yakni Ajib Abdullah mengemukakan:

“Iya akuntansi pertanggungjawaban bisa meningkatkan kinerja manajerial. Hal itu terjadi karena dengan adanya akuntansi pertanggungjawaban tentunya kita bisa mengetahui apa saja perencanaan, kemudian bisa menjadi pedoman penting langkah yang harus dibuat untuk mewujudkan sasaran, bisa memberikan penilaian kinerja bagian-bagian yang terdapat dalam dinas dan membantu manajemen dalam mengendalikan adanya penyimpangan realisasi dengan anggaran yang ditetapkan”.³⁷

Wawancara juga dilakukan pada Sekretariat Dinas terkait apakah penerapan akuntansi pertanggungjawaban bisa meningkatkan kinerja manajerial. Sekretariat Dinas yakni Ach. Hermanto Eka Wahyudi mengemukakan:

“Akuntansi pertanggungjawaban bisa meningkatkan kinerja manajerial karena akuntansi pertanggungjawaban bisa digunakan sebagai alat fundamental untuk pengendalian manajemen. Dengan adanya akuntansi pertanggungjawaban ini bisa digunakan sebaiknya salah satu alat perencanaan, acuan penting untuk langkah yang harus dibuat untuk mewujudkan sasaran, melakukan penilaian kinerja bagian yang terdapat dalam dinas”.³⁸

Wawancara juga dilakukan pada Bagian Keuangan mengenai apakah penerapan akuntansi pertanggungjawaban bisa meningkatkan kinerja manajerial. Bagian Keuangan yakni Adelia Frizky Arista mengemukakan:

³⁶ Adelia Frizky Arista, Bagian Keuangan, Wawancara Langsung, (1 April 2023).

³⁷ Ajib Abdullah, Kepala Dinas. Wawancara Langsung, (1 April 2023).

³⁸ Ach. Hermanto Eka Wahyudi, Sekretariat Dinas, Wawancara Langsung, (1 April 2023).

“Tentunya akuntansi pertanggungjawaban dapat meningkatkan kinerja manajerial hal itu terjadi dikarenakan akuntansi pertanggungjawaban bisa digunakan sebagai alat perencanaan, bisa menjadi pedoman penting mengenai langkah apa saja yang perlu dibuat dalam mewujudkan sasaran bahkan bisa menjadi tolak ukur untuk penilaian kinerja bagian yang terdapat dalam dinas dan sebagai alat fundamental dalam pengendalian manajemen”.³⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bisa dipaparkan bahwa adanya akuntansi pertanggungjawaban yang diterapkan oleh sebuah organisasi bisa meningkatkan kinerja manajerial. Hal tersebut terjadi karena dengan adanya akuntansi pertanggungjawaban dapat dipergunakan sebagai alat perencanaan, sebagai pedoman penting dalam rangka mewujudkan sasaran, menjadi tolak ukur penilaian kinerja bagian dalam Dinas, serta sebagai alat fundamental untuk pengendalian manajemen.

4. Pelaksanaan Kinerja Manajerial di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan

Sehubungan dengan bagaimana pelaksanaan kinerja manajerial di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan, peneliti melakukan wawancara pada Kepala Dinas, Sekretariat Dinas dan Bagian Keuangan. Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti melaksanakan wawancara mengenai bagaimana kinerja manajerial di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan. Berdasarkan hasil wawancara bisa disimpulkan bahwa kinerja manajerial di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan sudah bisa dikatakan baik yang mana Dinas sudah melaksanakan perencanaan, melakukan koordinasi, evaluasi, pengaturan staf, negoisasi, investigasi bahkan perwakilan dan pengawasan dengan efektif dan efisien. Hal tersebut dikemukakan oleh Kepala Dinas yakni Ajib Abdullah yang memaparkan bahwa:

“Kinerja manajerial di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan Sudah bisa dikatakan baik yang mana kami sudah melakukan perencanaan, melakukan koordinasi, evaluasi, pengaturan staf, negoisasi, investigasi

³⁹ Adelia Frizky Arista, Bagian Keuangan, Wawancara Langsung, (1 April 2023).

bahkan perwakilan dan pengawasan dengan efektif yaitu tujuan ataupun sasaran yang kami tentukan sudah tercapai, dan sudah efisien yaitu cara yang kami lakukan untuk mencapai tujuan sudah maksimal dengan menghemat sumber daya melalui pelaksanaan pekerjaan dengan benar”.⁴⁰

Peneliti juga melakukan wawancara kepada sekretariat dinas terkait bagaimana kinerja manajerial di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan. Sekretariat Dinas yakni Ach. Hermanto Eka Wahyudi memaparkan:

“Kinerja manajerial pada dinas tentunya bisa dikatakan baik dimana kami memang sudah melakukan beberapa fungsi-fungsi manajemen dengan efektif yakni tujuan ataupun sasaran yang kami tentukan sudah tercapai, dan sudah efisien yaitu cara yang kami lakukan untuk mencapai tujuan sudah maksimal dengan menghemat sumber daya melalui pelaksanaan pekerjaan dengan benar”.⁴¹

Wawancara juga dilakukan pada bagian keuangan mengenai bagaimana kinerja manajerial di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan. Bagian Keuangan yakni Adelia Frizky Arista memaparkan:

“Berdasarkan pertanyaan yang diajukan tersebut menurut saya kinerja manajerial di dinas sudah baik karena kami melakukan fungsi-fungsi manajemen dengan baik yang meliputi perencanaan, koordinasi, evaluasi, pengaturan staf, negoisasi, investigasi, perwakilan dan pengawasan dengan efektif yaitu tujuan ataupun sasaran yang kami tentukan sudah tercapai, dan sudah efisien yaitu cara yang kami lakukan untuk mencapai tujuan sudah maksimal dengan menghemat sumber daya melalui pelaksanaan pekerjaan dengan benar”.⁴²

Peneliti melaksanakan wawancara pada Kepala Dinas mengenai bagaimana pelaksanaan kinerja manajerial berdasarkan indikator aspek perencanaan, apakah anda berperan dalam menentukan tujuan kebijakan rencana kegiatan seperti penjadwalan kerja penyusunan anggaran dan penyusunan program dan apakah anda mempunyai kemampuan untuk membuat perencanaan operasional. Kepala Dinas yakni Ajib Abdullah memaparkan:

“Berdasarkan aspek perencanaan tentunya saya berperan untuk menentukan tujuan kebijakan kemudian juga rencana apa saja yang ada dalam kegiatan bahkan

⁴⁰ Ajib Abdullah, Kepala Dinas, Wawancara Langsung, (1 April 2023).

⁴¹ Ach. Hermanto Eka Wahyudi, Sekretariat Dinas, Wawancara Langsung, (1 April 2023).

⁴² Adelia Frizky Arista, Bagian Keuangan, Wawancara Langsung, (1 April 2023).

penjadwalan kerja penyusunan anggaran hingga menyusun program dan tentunya saya juga membuat perencanaan operasional. Setiap program dan kegiatan tersebut tentunya sudah ada indikator sasaran yang harus dicapai. Jadi bisa dikatakan bahwa, perencanaan yang kami lakukan sudah efektif dan efisien mbak. Dikatakan efektif yaitu tujuan kami sudah sesuai dengan tujuan atau tepat sasaran misalnya dalam penyusunan anggaran, semuanya sudah tepat sasaran mbak. Selain itu dikatakan efisien, dimana dalam mewujudkan tujuan atau sasaran yang kami tetapkan, kami sudah berusaha meminimalisir pengeluaran sumber daya seperti biaya, waktu dan tenaga. Contohnya anggaran untuk pembangunan prasarana pertanian, kami sudah menetapkan perencanaan anggaran untuk prasarana dan syukurnya sudah tepat sasaran dan kami juga menekan sumber daya (misalnya membeli produk untuk bahan pembangunan yang harganya terjangkau dengan kualitas yang bagus, berusaha agar pembangunan bisa selesai secepat mungkin dan memperkerjakan tukang bangunan profesional sebanyak 6 orang dengan target pembangunan bisa selesai secepat mungkin) agar pembangunan prasarana pertanian bisa berjalan baik”⁴³.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada sekretariat dinas terkait bagaimana pelaksanaan kinerja manajerial berdasarkan indikator aspek perencanaan, apakah anda berperan dalam menentukan tujuan kebijakan rencana kegiatan seperti penjadwalan kerja penyusunan anggaran dan penyusunan program dan apakah anda mempunyai kemampuan untuk membuat perencanaan operasional. Sekretariat Dinas yaitu Ach. Hermanto Eka Wahyudi memaparkan:

“Dari sisi perencanaan tentunya kami sudah melakukan pemilihan strategi, kebijakan, program, dan juga prosedur untuk mewujudkan tujuan. Saya juga berkontribusi untuk menentukan sebuah tujuan kebijakan, rencana aktivitas, jadwal kerja, penyusunan anggaran hingga program dan saya bisa membuat perencanaan operasional. Jadi bisa dikatakan bahwa, perencanaan yang kami lakukan sudah efektif dan efisien. Misalnya rencana anggaran untuk pembangunan prasarana pertanian, kami sudah menetapkan perencanaan anggaran untuk prasarana dan sudah tepat sasaran dan kami juga meminimalisir sumber daya misalnya membeli produk untuk bahan pembangunan yang harganya terjangkau dengan kualitas yang bagus, berusaha agar pembangunan bisa selesai secepat mungkin dan memperkerjakan tukang bangunan profesional sebanyak 6 orang dengan target pembangunan bisa selesai secepat mungkin”⁴⁴.

Wawancara juga dilakukan pada Bagian Keuangan mengenai bagaimana pelaksanaan kinerja manajerial berdasarkan indikator aspek perencanaan, apakah anda berperan dalam

⁴³ Ajib Abdullah, Kepala Dinas. Wawancara Langsung, (1 April 2023).

⁴⁴ Ach. Hermanto Eka Wahyudi, Sekretariat Dinas, Wawancara Langsung, (1 April 2023).

menentukan tujuan kebijakan rencana kegiatan seperti penjadwalan kerja penyusunan anggaran dan penyusunan program dan apakah anda mempunyai kemampuan untuk membuat perencanaan operasional. Bagian Keuangan yakni Adelia Frizky Arista menjelaskan:

“Berdasarkan aspek perencanaan saya memiliki peran dalam menentukan tujuan kebijakan, rencana kegiatan misalnya jadwal kerja kemudian penyusunan anggaran hingga program dan saya juga mampu membuat perencanaan operasional. Perencanaan ini merupakan hal yang penting dalam mewujudkan tujuan Dinas. Maka bisa dikatakan bahwa, perencanaan yang kami lakukan sudah efektif dan efisien. Misalnya rencana anggaran untuk pembangunan prasarana pertanian, kami sudah menetapkan perencanaan anggaran untuk prasarana dan sudah tepat sasaran dan kami juga meminimalisir sumber daya misalnya membeli produk untuk bahan pembangunan yang harganya terjangkau dengan kualitas yang bagus, berusaha agar pembangunan bisa selesai secepat mungkin dan memperkerjakan tukang bangunan profesional sebanyak 6 orang dengan target pembangunan bisa selesai secepat mungkin”.⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara bisa disimpulkan bahwasanya, dari aspek perencanaan, Kepala Dinas serta bawahannya berperan dalam menentukan tujuan kebijakan rencana kegiatan seperti penjadwalan kerja, penyusunan anggaran dan penyusunan program serta mempunyai kemampuan untuk membuat perencanaan operasional. Perencanaan tersebut sudah bisa dikatakan efektif serta efisien karena atasan serta bawahan ikut terlibat dalam proses perencanaan dari aspek partisipasi anggaran serta akuntansi pertanggungjawaban.

Dikatakan efektif yaitu tujuan yang Dinas capai sudah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan atau tepat sasaran misalnya dalam penyusunan anggaran yang sudah tepat sasaran. Selain itu dikatakan efisien, dimana dalam mewujudkan tujuan atau sasaran yang Dinas tetapkan, Dinas sudah berusaha meminimalisir pengeluaran sumber daya seperti biaya, waktu dan tenaga. Misalnya rencana anggaran untuk pembangunan prasarana pertanian, Dinas sudah menetapkan perencanaan anggaran untuk prasarana dan sudah tepat sasaran dan Dinas juga meminimalisir sumber daya misalnya membeli produk untuk bahan pembangunan dengan harga terjangkau

⁴⁵ Adelia Frizky Arista, Bagian Keuangan, Wawancara Langsung, (1 April 2023).

dengan kualitas yang bagus, berusaha agar pembangunan bisa selesai secepat mungkin dan memperkerjakan tukang bangunan profesional sebanyak 6 orang dengan target pembangunan bisa selesai secepat mungkin.

Wawancara dilaksanakan kepada Kepala Dinas mengenai bagaimana pelaksanaan kinerja manajerial berdasarkan indikator aspek koordinasi, apakah anda berperan dalam tukar menukar informasi dalam organisasi untuk mengkoordinasikan, menyesuaikan laporan dan apakah anda bekerja sama dengan bagian lain untuk bertukar informasi. Kepala Dinas yakni Ajib Abdullah memberikan penjelasan:

“Berdasarkan aspek koordinasi tentunya saya selalu melakukan koordinasi dan juga saling bertukar informasi, menyesuaikan pelaporan dan bekerja sama dengan bagian lain untuk memperoleh informasi. Koordinasi ini dilakukan setiap bulan mengenai target kinerja dan juga kegiatan. Koordinasi yang kami lakukan sudah efektif dan efisien mbak dimana kami sudah membuat perencanaan yang matang, menyamakan persepsi, memahami materi yang kami bicarakan, saling terbuka, saling menghargai, meminta umpan balik, memberikan motivasi”.⁴⁶

Peneliti juga melakukan wawancara pada Sekretariat Dinas terkait bagaimana pelaksanaan kinerja manajerial berdasarkan indikator aspek koordinasi, apakah anda berperan dalam tukar menukar informasi dalam organisasi untuk mengkoordinasikan, menyesuaikan laporan dan apakah anda bekerja sama dengan bagian lain untuk bertukar informasi. Sekretariat Dinas yakni Ach. Hermanto Eka Wahyudi memberikan penjelasan:

“Dari aspek koordinasi tentunya saya memiliki peran dalam pertukaran informasi untuk mengkoordinasikan kemudian menyesuaikan laporan dan juga saya bekerja sama dengan bagian lain untuk mendapatkan informasi tersebut. Koordinasi yang kami lakukan sudah efektif dan efisien mbak dimana kami sudah membuat perencanaan yang matang, menyamakan persepsi, memahami materi yang dibicarakan, saling terbuka dan menghargai, meminta umpan balik, memberikan motivasi”.⁴⁷

Wawancara dengan pertanyaan yang sama mengenai bagaimana pelaksanaan kinerja manajerial berdasarkan indikator aspek koordinasi, apakah anda berperan dalam tukar menukar

⁴⁶ Ajib Abdullah, Kepala Dinas. Wawancara Langsung, (1 April 2023).

⁴⁷ Ach. Hermanto Eka Wahyudi, Sekretariat Dinas, Wawancara Langsung, (1 April 2023).

informasi dalam organisasi untuk mengkoordinasikan, menyesuaikan laporan dan apakah anda bekerja sama dengan bagian divisi lain untuk bertukar informasi juga dilakukan pada Bagian Keuangan yakni Adelia Frizky Arista yang menjelaskan:

“Berkaitan dengan aspek koordinasi di mana koordinasi ini bisa dilakukan dengan tukar menukar informasi dengan bagian lain untuk menyesuaikan dan mengaitkan sebuah program. Tentunya saya berperan dalam tukar menukar informasi untuk mengkoordinasikan kemudian menyesuaikan sebuah laporan dan saling bekerjasama dengan bagian lain untuk mendapatkan atau menukar informasi yang dibutuhkan untuk keberlanjutan program ataupun tujuan. Kordinasi yang kami lakukan sudah efektif dan efesien mbak dimana kami sudah membuat perencanaan yang matang, menyamakan persepsi, memahami materi yang dibahas, saling terbuka dan menghargai, meminta umpan balik, memberikan motivasi”.⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara tentunya bisa diambil kesimpulan bahwa saya dari aspek koordinasi yakni atasan serta bawahan saling tukar menukar informasi untuk menyesuaikan serta mengaitkan sebuah program. Dengan adanya koordinasi tentangnya bisa menyesuaikan sebuah laporan serta melakukan kerjasama dengan bagian lain dalam rangka mendapatkan apapun menukar informasi yang diperlukan untuk keberlanjutan program ataupun tujuan organisasi. Kordinasi yang Dinas lakukan sudah efektif dan efesien, dimana Dinas sudah membuat perencanaan yang matang, menyamakan persepsi, memahami materi yang diicarakan, saling terbuka, saling menghargai, meminta umpan balik dan memberikan motivasi.

Wawancara dilaksanakan kepada Kepala Dinas mengenai bagaimana pelaksanaan kinerja manajerial berdasarkan indikator evaluasi, apakah anda berperan dalam melakukan evaluasi, menilai kinerja serta mengukur hasil kerja para bawahan ataupun karyawan. Kepala Dinas yakni Ajib Abdullah menjelaskan:

“Pelaksanaan kinerja manajerial dari aspek evaluasi yakni saya itu memiliki peran dalam melakukan evaluasi kemudian saya menilai kinerja serta mengukur hasil kerja para bawahan. Hal ini memang sangat penting ya untuk dilakukan karena dengan adanya evaluasi kita bisa menilai apa saja yang menjadi kekurangan dan selanjutnya dengan adanya kekurangan yang kita ketahui tersebut kita bisa memperbaiki ke

⁴⁸ Adelia Frizky Arista, Bagian Keuangan, Wawancara Langsung, (1 April 2023).

depannya. Selain itu saya juga melakukan evaluasi untuk menilai dan mengukur proposal hingga pelaporan keuangan Dinas. Jadi bisa dikatakan bahwa evaluasi, penilaian kinerja dan pengukuran hasil kerja sudah efektif dan efisien karena kami sudah menentukan perencanaan, menetapkan metode, melaksanakan evaluasi, mengolah dan menganalisis data hasil evaluasi, menilai kinerja dan pengukuran hasil kerja yang efektif dan efisien dengan jelas dan dapat ditindaklanjuti”.⁴⁹

Peneliti juga melaksanakan wawancara kepada bagian Sekretariat Dinas terkait bagaimana pelaksanaan kinerja manajerial berdasarkan indikator evaluasi, apakah anda berperan dalam melakukan evaluasi, menilai kinerja serta mengukur hasil kerja para bawahan ataupun karyawan. Sekretariat Dinas yakni Ach. Hermanto Eka Wahyudi menjelaskan:

“Dari sisi evaluasi tentunya saya memiliki peran dalam melakukan evaluasi seperti misalnya saya melakukan penilaian kinerja dan mengukur hasil kerja para bawahan saya bahkan saya juga melakukan penilaian laporan keuangan dan lainnya. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwasanya evaluasi, penilaian kinerja dan pengukuran hasil kerja sudah efektif dan efisien karena kami sudah menentukan perencanaan, menetapkan metode, melaksanakan evaluasi, mengolah dan menganalisis data hasil evaluasi, menilai kinerja dan pengukuran hasil kerja yang efektif dan efisien dengan jelas dan dapat ditindaklanjuti ”.⁵⁰

Wawancara dengan pertanyaan yang sama mengenai bagaimana pelaksanaan kinerja manajerial berdasarkan indikator evaluasi, apakah anda berperan dalam melakukan evaluasi, menilai kinerja serta mengukur hasil kerja para bawahan ataupun karyawan dilakukan pada Bagian Keuangan yakni Adelia Frizky Arista yang menjelaskan:

“Melihat dari aspek kinerja manajerial dari sisi evaluasi yang mana evaluasi ini termasuk fungsi pokok yang digunakan untuk melakukan penilaian serta pengukuran dalam hasil kerja para bawahan. Tentunya saya memiliki peran dalam melakukan evaluasi kemudian menilai kinerja serta mengukur hasil kerja bawahan tersebut. Saya juga melakukan penilaian dan pengukuran terkait pelaporan keuangan serta laporan lainnya. Maka dapat dikatakan bahwa evaluasi, penilaian kinerja dan pengukuran hasil kerja sudah efektif dan efisien karena kami sudah menentukan perencanaan, menetapkan metode, melaksanakan evaluasi, mengolah dan menganalisis data hasil

⁴⁹ Ajib Abdullah, Kepala Dinas. Wawancara Langsung, (1 April 2023).

⁵⁰ Ach. Hermanto Eka Wahyudi, Sekretariat Dinas, Wawancara Langsung, (1 April 2023).

evaluasi, penilaian kinerja dan pengukuran hasil kerja yang efektif dan efisien dengan jelas dan dapat ditindaklanjuti”.⁵¹

Mengacu pada hasil perolehan wawancara tentunya bisa disimpulkan bahwa dari aspek kinerja manajerial bagian evaluasi yang mana evaluasi tersebut dilakukan untuk melaksanakan penilaian sekaligus pengukuran hasil kerja bawahan. Dalam hal ini, Kepala Dinas, Sekretariat dan bagian keuangan memiliki peran untuk melaksanakan evaluasi, melaksanakan penilaian kinerja sekaligus melaksanakan pengukuran hasil kerja bawahan. Maka, dapat dikatakan bahwa evaluasi, penilaian kinerja dan pengukuran hasil kerja sudah efektif dan efisien karena Dinas sudah menentukan perencanaan, menetapkan metode, melaksanakan evaluasi, mengolah dan menganalisis data hasil evaluasi, penilaian kinerja dan pengukuran hasil kerja yang efektif dan efisien dengan jelas dan dapat ditindaklanjuti

Wawancara dilaksanakan kepada Kepala Dinas mengenai bagaimana pelaksanaan kinerja manajerial berdasarkan indikator pengaturan staff, apakah anda berperan dalam mengelola ataupun mengatur pegawai serta melakukan seleksi sekaligus mempromosikan karyawan. Kepala Dinas yakni Ajib Abdullah memaparkan:

“Dari sisi pengaturan staf tentunya saya ini memberikan peran penting dalam melakukan pengelolaan serta mengatur pegawai bahkan melakukan seleksi hingga promosi karyawan karena hal ini memang wewenang saya. Seperti misalnya pangkat dan golongan kemudian kompetensi sumber daya manusia yang bersangkutan. Penempatan staf tersebut juga saya buat berdasarkan kemampuan dan minat karyawan. Pengaturan staf ini yakni sebuah proses yang memuat spesifikasi pekerjaan, pergerakan tenaga, spesifikasi, pekerja, seleksi dan penyusunan organisasi yang digunakan untuk melatih dan mempersiapkan karyawan supaya bisa melakukan pekerjaan mereka dengan sebaik mungkin. Sehingga, bisa dikatakan bahwa pengelolaan karyawan, seleksi dan promosi karyawan sudah efektif dan efisien. Karena pengelolaan karyawan yang kami lakukan sudah berusaha meningkatkan keterampilan karyawan, meningkatkan profesionalisme, meningkatkan kualitas kerja, solidaritas tim, menerapkan metode pengelolaan sumber daya manusia berdasarkan kebutuhan, dan melakukan dokumentasi serta pertemuan rutin. Selain itu dalam seleksi, kami sudah menentukan kebutuhan, menyebar informasi lowongan,

⁵¹ Adelia Frizky Arista, Bagian Keuangan, Wawancara Langsung, (1 April 2023).

melakukan seleksi berkualitas, wawancara efektif, referensi dan verifikasi, menilai budaya organisasi, mengambil keputusan, onboarding yang baik, evaluasi dan umpan balik. Dalam promosi jabatan, kami sudah mempertimbangkan beberapa hal seperti loyalitas, motivasi, kemampuan manajemen, komunikasi dan solutif”.⁵²

Peneliti melakukan wawancara kepada Sekretariat Dinas mengenai bagaimana pelaksanaan kinerja manajerial berdasarkan indikator pengaturan staff, apakah anda berperan dalam mengelola ataupun mengatur pegawai serta melakukan seleksi sekaligus mempromosikan karyawan. Sekretariat Dinas yakni Ach. Hermanto Eka Wahyudi memaparkan:

“Untuk aspek pengaturan staf tentunya hal tersebut diatur oleh kepala dinas karena memang untuk mempromosikan karyawan yakni wewenang kepala dinas seperti misalnya pangkat dan golongan, hingga kompetensi sumber daya manusia yang bersangkutan. Sehingga, dapat dikatakan bahwa pengelolaan karyawan, seleksi dan promosi karyawan sudah efektif dan efisien. Karena seperti yang dikemukakan pak Ajib, pengelolaan karyawan yang Dinas lakukan sudah berusaha meningkatkan keterampilan karyawan, meningkatkan profesionalisme, meningkatkan kualitas kerja, solidaritas tim, menerapkan metode pengelolaan sumber daya manusia berdasarkan kebutuhan, dan melakukan dokumentasi serta pertemuan rutin. Selain itu dalam seleksi, Dinas sudah menentukan kebutuhan, menyebar informasi lowongan, melakukan seleksi berkualitas, wawancara efektif, referensi dan verifikasi, menilai budaya organisasi, mengambil keputusan, onboarding yang baik, evaluasi dan umpan balik. Dalam promosi jabatan, kami sudah mempertimbangkan beberapa hal seperti loyalitas, motivasi, kemampuan manajemen, komunikasi dan solutif”.⁵³

Peneliti juga melaksanakan wawancara kepada bagian keuangan mengenai bagaimana pelaksanaan kinerja manajerial berdasarkan indikator pengaturan staff, apakah anda berperan dalam mengelola ataupun mengatur pegawai serta melakukan seleksi sekaligus mempromosikan karyawan. Bagian Keuangan yakni Adelia Frizky Arista memaparkan:

“Dari aspek pengaturan staf yakni peran dilakukan oleh Kepala Dinas yang mana beliau tersebut memang memiliki wewenang mengatur, mengelola, menyeleksi dan mempromosikan karyawan. Dan sejauh ini pengaturan staf sudah dilakukan dengan baik. Hal itu terjadi karena penempatan staf didasarkan pada kemampuan dan minat karyawan. Dapat dikatakan bahwa pengelolaan karyawan, seleksi dan promosi karyawan sudah efektif dan efisien. Karena pengelolaan karyawan yang Dinas lakukan sudah berusaha meningkatkan keterampilan karyawan, meningkatkan profesionalisme, meningkatkan kualitas kerja, solidaritas tim, menerapkan metode

⁵² Ajib Abdullah, Kepala Dinas. Wawancara Langsung, (1 April 2023).

⁵³ Ach. Hermanto Eka Wahyudi, Sekretariat Dinas, Wawancara Langsung, (1 April 2023).

pengelolaan sumber daya manusia berdasarkan kebutuhan, dan melakukan dokumentasi serta pertemuan rutin. Selain itu dalam seleksi, Dinas sudah menentukan kebutuhan, menyebar informasi lowongan, melakukan seleksi berkualitas, wawancara efektif, referensi dan verifikasi, menilai budaya organisasi, mengambil keputusan, onboarding yang baik, evaluasi dan umpan balik. Dalam promosi jabatan, Dinas sudah mempertimbangkan beberapa hal seperti loyalitas, motivasi, kemampuan manajemen, komunikasi dan solutif⁵⁴.

Berdasarkan hasil wawancara, dari aspek pengaturan staf Kepala Dinas berperan penting dalam melakukan pengelolaan, mengatur pegawai, melakukan seleksi hingga promosi karyawan karena hal ini memang menjadi wewenangnya. Penempatan staf tersebut juga dibuat berdasarkan kemampuan dan minat karyawan. Pengaturan staf ini yakni sebuah proses yang memuat spesifikasi pekerjaan, pergerakan tenaga, spesifikasi, pekerja, seleksi dan penyusunan organisasi yang digunakan untuk melatih dan mempersiapkan karyawan supaya bisa melakukan pekerjaan mereka dengan baik.

Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa pengelolaan karyawan, seleksi dan promosi karyawan sudah efektif dan efisien. Karena pengelolaan karyawan yang Dinas lakukan sudah berusaha meningkatkan keterampilan karyawan, meningkatkan profesionalisme, meningkatkan kualitas kerja, solidaritas tim, menerapkan metode pengelolaan sumber daya manusia berdasarkan kebutuhan, dan melakukan dokumentasi serta pertemuan rutin. Selain itu dalam seleksi, Dinas sudah menentukan kebutuhan, menyebar informasi lowongan, melakukan seleksi berkualitas, wawancara efektif, referensi dan verifikasi, menilai budaya organisasi, mengambil keputusan, onboarding yang baik, evaluasi dan umpan balik. Dalam promosi jabatan, Dinas sudah mempertimbangkan beberapa hal seperti loyalitas, motivasi, kemampuan manajemen, komunikasi dan solutif

Wawancara mengenai bagaimana pelaksanaan kinerja manajerial berdasarkan indikator negoisasi, apakah anda melakukan kontrak untuk barang ataupun jasa yang diperlukan serta

⁵⁴ Adelia Frizky Arista, Bagian Keuangan, Wawancara Langsung, (1 April 2023).

melakukan negoisasi saat melakukan kegiatan dengan pihak luar. Berdasarkan hasil wawancara bisa disimpulkan bahwa berdasarkan aspek negoisasi Dinas udah melaksanakan kontrak untuk pengadaan barang ataupun jasa yang diperlukan dengan melaksanakan negoisasi sesuai dengan pengadaan Perpres No. 12 tahun 2021 dan harus sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kemudian negoisasi juga dilaksanakan apa pada saat melakukan aktivitas dengan pihak luar. Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa negoisasi yang kami lakukan sudah efektif dan efisien karena didasarkan pada Perpres No. 12 tahun 2021 dan regulasi yang berlaku. Kepala Dinas yakni Ajib Abdullah menjelaskan:

“Dari aspek negoisasi tentunya saya melakukan kontrak untuk barang ataupun jasa yang dibutuhkan dengan melakukan negoisasi dan negoisasi juga dilakukan ketika melakukan aktivitas dengan pihak luar. Negoisasi ini dilakukan pada saat melakukan pengadaan pada bidang pertanian dan tahapan-tahapan pengadaan tersebut sudah sesuai dengan pengadaan Perpres No. 12 tahun 2021 dan harus sesuai dengan regulasi yang berlaku. Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa negoisasi yang kami lakukan sudah efektif dan efisien karena didasarkan pada Perpres dan regulasi yang berlaku”.⁵⁵

Peneliti melakukan wawancara kepada Sekretariat Dinas mengenai bagaimana pelaksanaan kinerja manajerial berdasarkan indikator negoisasi, apakah anda melakukan kontrak untuk barang ataupun jasa yang diperlukan serta melakukan negoisasi saat melakukan kegiatan dengan pihak luar. Sekretariat Dinas yakni Ach. Hermanto Eka Wahyudi menjelaskan:

“Berdasarkan aspek negoisasi tentunya ketika melakukan kontrak barang ataupun jasa yang dibutuhkan saya pastinya melakukan negoisasi dengan pihak luar seperti misalnya terkait pengadaan sebuah produk pertanian dan tentunya hal itu perlu adanya negoisasi dari misalnya tawar menawar kemudian penjualan dan lain sebagainya. Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa negoisasi yang kami lakukan sudah efektif dan efisien karena didasarkan pada Perpres dan regulasi yang berlaku”.⁵⁶

Wawancara yang sama dilakukan pada Bagian Keuangan berkenaan dengan bagaimana pelaksanaan kinerja manajerial berdasarkan indikator negoisasi, apakah anda melakukan kontrak

⁵⁵ Ajib Abdullah, Kepala Dinas. Wawancara Langsung, (1 April 2023).

⁵⁶ Ach. Hermanto Eka Wahyudi, Sekretariat Dinas, Wawancara Langsung, (1 April 2023).

untuk barang ataupun jasa yang diperlukan serta melakukan negoisasi saat melakukan kegiatan dengan pihak luar. Bagian Keuangan yakni Adelia Frizky Arista menjelaskan:

“Dari aspek negoisasi, tentunya sudah pasti saya ketika melakukan kontrak negosiasi itu sangat diperlukan untuk melakukan kegiatan dengan pihak luar seperti misalnya terkait pengadaan barang. Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa negoisasi yang kami lakukan sudah efektif dan efisien karena didasarkan pada Perpres dan regulasi yang berlaku. Negoisasi itu suatu hal yang sangat penting ketika berhubungan dengan pihak luar”.⁵⁷

Wawancara dilaksanakan kepada Kepala Dinas mengenai bagaimana pelaksanaan kinerja manajerial berdasarkan indikator investigasi, apakah anda berperan dalam mengumpulkan serta menyiapkan informasi berbentuk catatan atau laporan dan apakah pengumpulan serta penyampaian laporan tersebut tepat waktu. Kepala Dinas yakni Ajib Abdullah menjelaskan:

“Berdasarkan aspek investigasi tentunya saya mempunyai peran untuk mengumpulkan dan menyiapkan informasi sebagai bahan laporan apakah penyampaian laporan tersebut tepat waktu. Pengumpulan dan penyiapan informasi sebagai bahan laporan tersebut memang sangat penting untuk disampaikan tepat waktu karena hal ini sangat dibutuhkan untuk kepentingan pihak Dinas itu sendiri dan pemerintah. Investigasi di Dinas sudah efektif dan efisien karena pengumpulan, penyiapan dan penyampaian laporan sudah tepat waktu dengan dilakukan secara cermat dan seksama”.⁵⁸

Peneliti juga melakukan wawancara pada Sekretariat Dinas terkait bagaimana pelaksanaan kinerja manajerial berdasarkan indikator investigasi, apakah anda berperan dalam mengumpulkan serta menyiapkan informasi berbentuk catatan atau laporan dan apakah pengumpulan serta penyampaian laporan tersebut tepat waktu. Sekretariat Dinas yakni Ach. Hermanto Eka Wahyudi menjelaskan:

“Berdasarkan aspek investigasi saya memiliki peran untuk mengumpulkan dan menyiapkan informasi berupa laporan dan mengumpulkan sekaligus menyampaikan laporan tersebut tepat waktu. Maka, bisa dikatakan bahwa ivestigasi di Dinas sudah efektif dan efisien karena pengumpulan, penyiapan dan penyampaian laporan sudah tepat waktu dengan dilakukan secara cermat dan seksama”.⁵⁹

⁵⁷ Adelia Frizky Arista, Bagian Keuangan, Wawancara Langsung, (1 April 2023).

⁵⁸ Ajib Abdullah, Kepala Dinas. Wawancara Langsung, (1 April 2023).

⁵⁹ Ach. Hermanto Eka Wahyudi, Sekretariat Dinas, Wawancara Langsung, (1 April 2023).

Wawancara yang sama dilakukan pada Bagian Keuangan mengenai bagaimana pelaksanaan kinerja manajerial berdasarkan indikator investigasi, apakah anda berperan dalam mengumpulkan serta menyiapkan informasi berbentuk catatan atau laporan dan apakah pengumpulan serta penyampaian laporan tersebut tepat waktu. Bagian Keuangan yakni Adelia Frizky Arista menjelaskan:

“Ketika diberikan pertanyaan dari aspek investigasi tentunya saya punya peran untuk mengumpulkan sekaligus menyiapkan sebuah laporan dengan tepat waktu. Dapat disimpulkan bahwa, investigasi di Dinas sudah efektif dan efisien karena pengumpulan, penyiapan dan penyampaian laporan sudah tepat waktu dengan dilakukan secara cermat dan seksama”.⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara bisa disimpulkan bahwa dari aspek investigasi, anggota yang terdapat pada dinas mempunyai peran untuk mengumpulkan dan menyiapkan informasi sebagai bahan laporan serta penyampaian laporan tersebut dilaporkan tepat waktu. Pengumpulan dan penyiapan informasi sebagai bahan laporan penting untuk disampaikan tepat waktu karena sangat dibutuhkan untuk kepentingan pihak Dinas serta pemerintah. Sehingga dapat dikatakan bahwa investigasi di Dinas sudah efektif dan efisien karena pengumpulan, penyiapan informasi berupa laporan dan penyampaian laporan sudah tepat waktu dengan dilakukan secara cermat dan seksama.

Peneliti melaksanakan wawancara terkait bagaimana pelaksanaan kinerja manajerial berdasarkan indikator perwakilan, apakah anda selalu menyampaikan informasi mengenai visi, misi dan kegiatan organisasi dengan cara komunikasi, konsultasi serta promosi untuk tujuan umum organisasi pada pihak luar. Berdasarkan hasil wawancara bisa disimpulkan bahwa dari aspek perwakilan, anggota yang terdapat pada Dinas sudah menyampaikan informasi sehubungan dengan visi, misi serta aktivitas organisasi dengan komunikasi, konsultasi bahkan

⁶⁰ Adelia Frizky Arista, Bagian Keuangan, Wawancara Langsung, (1 April 2023).

promosi untuk tujuan umum organisasi tersebut pada pihak luar. Sehingga dapat dikatakan bahwa perkakilan di Dinas sudah efektif dan efisien. Hal tersebut dikemukakan oleh Kepala Dinas yakni Ajib Abdullah yang menjelaskan:

“Tentunya dari aspek perwakilan ini saya selalu menyampaikan informasi terkait visi, misi serta aktivitas organisasi dengan cara berkomunikasi kemudian juga melakukan konsultasi bahkan promosi untuk tujuan umum organisasi kepada pihak luar. Visi misi tersebut sudah tercantum dalam rencana strategis pembangunan di Dinas. Sehingga dapat dikatakan bahwa perkakilan di Dinas sudah efektif dan efisien”.⁶¹

Peneliti juga memberikan pertanyaan yang sama pada Sekretariat Dinas berkenaan dengan bagaimana pelaksanaan kinerja manajerial berdasarkan indikator perwakilan, apakah anda selalu menyampaikan informasi mengenai visi, misi dan kegiatan organisasi dengan cara komunikasi, konsultasi serta promosi untuk tujuan umum organisasi pada pihak luar. Sekretariat Dinas yakni Ach. Hermanto Eka Wahyudi menjelaskan:

“Dari aspek perwakilan pada dasarnya visi, misi, aktivitas organisasi disampaikan dengan melakukan komunikasi konsultasi serta promosi yang berkaitan dengan tujuan umum organisasi tersebut. Maka dapat dikatakan bahwa perkakilan di Dinas sudah efektif dan efisien”.⁶²

Wawancara juga dilakukan pada Bagian Keuangan terkait bagaimana pelaksanaan kinerja manajerial berdasarkan indikator perwakilan, apakah anda selalu menyampaikan informasi mengenai visi, misi dan kegiatan organisasi dengan cara komunikasi, konsultasi serta promosi untuk tujuan umum organisasi pada pihak luar. Bagian Keuangan yakni Adelia Frizky Arista menjelaskan:

“Melihat aspek perwakilan tentunya penyampaian informasi terkait visi misi aktivitas organisasi dilakukan dengan Melalui komunikasi kemudian berkonsultasi serta melakukan aktivitas promosi untuk tujuan umum Dinas itu sendiri. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa perkakilan di Dinas sudah efektif dan efisien”.⁶³

⁶¹ Ajib Abdullah, Kepala Dinas. Wawancara Langsung, (1 April 2023).

⁶² Ach. Hermanto Eka Wahyudi, Sekretariat Dinas, Wawancara Langsung, (1 April 2023).

⁶³ Adelia Frizky Arista, Bagian Keuangan, Wawancara Langsung, (1 April 2023).

Selanjutnya, peneliti juga melaksanakan wawancara terkait bagaimana pelaksanaan kinerja manajerial berdasarkan indikator pengawasan apakah anda sudah melakukan pengukuran dan pembetulan pada aktivitas bawahan untuk menjamin pelaksanaan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Dari hasil wawancara bisa disimpulkan bahwa dari aspek pengawasan, Kepala Dinas sudah melaksanakan pengukuran serta pembetulan terkait aktivitas bawahan agar bisa memberikan jaminan pelaksanaan sesuai dengan apa yang direncanakan. Aktivitas pengawasan dilaksanakan dengan memberikan arahan, memimpin dan mengembangkan bawahan, melatih, membimbing sekaligus memberikan tugas dan menangani keluhan bawahan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengawasan di Dinas sudah efektif dan efisien pengawasan yang Dinas lakukan sudah akurat, tepat waktu, objektif dan menyeluruh, terpusat pada titik pengawasan strategik, realistik secara ekonomis dan organisasional, terkoordinasi dengan aliran organisasi, fleksibel, bersifat petunjuk dan operasional serta diterima para anggota di Dinas. Hal tersebut dikemukakan oleh Kepala Dinas yakni Ajib Abdullah yang memaparkan:

“Pengawasan ini berkaitan dengan pengukuran serta pembetulan terkait aktivitas bawahan agar bisa menjamin pelaksanaan tersebut selaras dengan rencana yang sudah ditetapkan. Dalam hal ini tentunya saya melakukan aktivitas pengawasan dengan memberikan arahan, memimpin dan mengembangkan bawahan, melatih, membimbing sekaligus memberikan tugas dan menangani keluhan bawahan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengawasan di Dinas sudah efektif dan efisien pengawasan yang Dinas lakukan sudah akurat, tepat waktu, objektif dan menyeluruh, terpusat pada titik pengawasan strategik, realistik secara ekonomis dan organisasional, terkoordinasi dengan aliran organisasi, fleksibel, bersifat petunjuk dan operasional serta diterima para anggota Dinas”.⁶⁴

Peneliti juga memberikan pertanyaan yang sama pada Sekretariat Dinas berkenaan dengan bagaimana pelaksanaan kinerja manajerial berdasarkan indikator pengawasan apakah anda sudah melakukan pengukuran dan pembetulan pada aktivitas bawahan untuk menjamin pelaksanaan

⁶⁴ Ajib Abdullah, Kelapa Dinas. Wawancara Langsung, (1 April 2023).

sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Sekretariat Dinas yakni Ach. Hermanto Eka Wahyudi memaparkan:

“Dari aspek pengawasan tentunya saya melakukan pengukuran serta pembetulan mengenai apa yang bawahan lakukan agar bisa memberikan jaminan pelaksanaan tersebut sudah berdasarkan apa yang sudah terencana. Maka dapat dikatakan bahwa pengawasan di Dinas sudah efektif dan efisien pengawasan yang Dinas lakukan sudah akurat, tepat waktu, objektif dan menyeluruh, terpusat pada titik pengawasan strategik, realistik secara ekonomis dan organisasional, terkoordinasi dengan aliran organisasi, fleksibel, bersifat petunjuk dan operasional serta diterima para anggota Dinas”.⁶⁵

Wawancara juga dilakukan pada Bagian Keuangan terkait bagaimana pelaksanaan kinerja manajerial berdasarkan indikator pengawasan apakah anda sudah melakukan pengukuran dan pembetulan pada aktivitas bawahan untuk menjamin pelaksanaan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Bagian Keuangan yakni Adelia Frizky Arista memaparkan:

“Melihat aspek pengawasan tentunya saya sudah melaksanakan pembetulan sekaligus pengukuran terkait apa yang bawahan lakukan supaya bisa memberi jaminan papa yang dilaksanakan tersebut sudah selaras dengan apa yang terencana sebelumnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pengawasan di Dinas sudah efektif dan efisien pengawasan yang Dinas lakukan sudah akurat, tepat waktu, objektif dan menyeluruh, terpusat pada titik pengawasan strategik, realistik secara ekonomis dan organisasional, terkoordinasi dengan aliran organisasi, fleksibel, bersifat petunjuk dan operasional serta diterima para anggota di Dinas”.⁶⁶

Peneliti melakukan wawancara pada Kepala Dinas mengenai menurut pendapat anda apakah kinerja manajerial di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan sudah berjalan efektif dan efisien. Kepala Dinas yakni Ajib Abdullah memberi pemaparan:

“Menurut pendapat saya kinerja manajerial di dinas sudah bisa dikatakan efektif dan efisien. Hal itu bisa dilihat dari bagaimana Saya melakukan kinerja manajerial dengan mengacu pada fungsi-fungsi manajemen yang terdapat pada teori manajemen di mana fungsi-fungsi manajemen dalam kinerja manajerial tersebut berkaitan dengan perencanaan, melakukan koordinasi, evaluasi, pengaturan staf, negoisasi, investigasi bahkan perwakilan dan pengawasan secara efektif dan efisien. Di mana fungsi-fungsi manajemen yang sudah disebutkan tadi sudah kami melaksanakan semaksimal mungkin agar kinerja manajerial semakin mengalami peningkatan dibandingkan

⁶⁵ Ach. Hermanto Eka Wahyudi, Sekretariat Dinas, Wawancara Langsung, (1 April 2023).

⁶⁶ Adelia Frizky Arista, Bagian Keuangan, Wawancara Langsung, (1 April 2023).

sebelumnya tentunya didukung oleh adanya penerapan partisipasi anggaran dan akuntansi pertanggungjawaban. Selain itu kinerja manajerial kami sudah masuk ke dalam kategori efektif dan efisien. Dikatakan efektif karena kami sudah menjelaskan tujuan yang hendak kami capai dengan jelas, strategi yang kami gunakan untuk mencapai tujuan juga sudah jelas dan diterapkan sebaik mungkin, analisa dan perumusan kebijakan yang kami lakukan juga sudah mantap karena kami benar-benar memikirkan secara matang dan berkolaborasi dengan bagian lainnya, perencanaan yang kami buat juga sudah secara matang, kami juga melakukan penyusunan program secara tepat, sarana dan prasana yang ada di Dinas juga lengkap untuk menunjang kinerja kami, pelaksanaan program kegiatan yang kami lakukan sudah efektif dan efisien, selain itu kami juga melakukan pengawasan dan pendalian yang mendidik dan baik. Kemudian, kinerja manajerial Dinas sudah efisien karena kinerja kami sudah berhasil guna, ekonomis, pelaksanaan kerja yang bisa kami pertanggungjawabkan, adanya pembagian kerja, rasionalitas tanggung jawab dan wewenang, serta adanya prosedur kerja yang praktis”.⁶⁷

Peneliti juga memberikan pertanyaan yang sama pada Sekretariat Dinas mengenai menurut pendapat anda apakah kinerja manajerial di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan sudah berjalan efektif dan efisien. Sekretariat Dinas yakni Ach. Hermanto Eka Wahyudi memberi pemaparan:

“Kinerja manajerial di dinas bisa dikatakan efektif dan efisien yang mana kami sudah melakukan beberapa fungsi manajemen yang berkaitan dengan perencanaan, melakukan koordinasi, evaluasi, pengaturan staf, negoisasi, investigasi bahkan perwakilan dan pengawasan yang sudah kami melaksanakan semaksimal mungkin tentunya dengan didukung oleh adanya penerapan partisipasi anggaran dan juga akuntansi pertanggungjawaban yang meningkatkan kinerja manajerial di dinas. Selain itu kinerja manajerial kami sudah masuk ke dalam kategori efektif dan efisien. Dikatakan efektif karena kami sudah menjelaskan tujuan yang hendak kami capai se jelas mungkin kepada seluruh anggota Dinas, strategi yang kami gunakan untuk mencapai tujuan juga sudah jelas, analisa dan perumusan kebijakan yang kami lakukan juga sudah mantap karena kami memikirkan secara matang dan berkolaborasi dengan lainnya, perencanaan yang kami buat juga sudah secara matang, kami juga melakukan penyusunan program secara tepat, sarana dan prasana yang ada di Dinas juga lengkap untuk menunjang kinerja kami, pelaksanaan program kegiatan yang kami lakukan sudah efektif dan efisien, selain itu kami juga melakukan pengawasan dan pendalian yang mendidik dan baik. Kemudian, kinerja manajerial Dinas sudah efisien karena berhasil guna, ekonomis, pelaksanaan kerja yang bisa kami pertanggungjawabkan, adanya pembagian kerja, rasionalitas tanggung jawab dan wewenang, serta adanya prosedur kerja yang praktis”.⁶⁸

⁶⁷ Ajib Abdullah, Kepala Dinas. Wawancara Langsung, (1 April 2023).

⁶⁸ Ach. Hermanto Eka Wahyudi, Sekretariat Dinas, Wawancara Langsung, (1 April 2023).

Wawancara juga dilakukan pada Bagian Keuangan terkait menurut pendapat anda apakah kinerja manajerial di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan sudah berjalan efektif dan efisien. Bagian Keuangan yakni Adelia Frizky Arista memaparkan:

“Tentunya kinerja manajerial di dinas bisa dibilang efektif dan efisien karena kami sudah menerapkan fungsi-fungsi manajemen dalam kinerja manajerial sebaik mungkin. Selain itu kami juga menerapkan partisipasi anggaran dan akuntansi pertanggungjawaban untuk meningkatkan kinerja manajerial. Selain itu kinerja manajerial kami sudah masuk ke dalam kategori efektif dan efisien. Kinerja manajerial kami dikatakan efektif karena kami sudah menjelaskan tujuan yang hendak kami capai, strategi yang kami gunakan untuk mencapai tujuan juga sudah jelas, analisa dan perumusan kebijakan yang kami lakukan juga sudah mantap karena kami benar-benar memikirkan secara matang dan berkolaborasi dengan lainnya, perencanaan yang kami buat juga sudah secara matang, kami juga melakukan penyusunan program secara tepat, sarana dan prasana yang ada di Dinas juga lengkap untuk menunjang kinerja kami, pelaksanaan program kegiatan yang kami lakukan sudah efektif dan efisien, selain itu kami juga melakukan pengawasan dan pendalian yang mendidik dan baik. Kemudian, kinerja manajerial Dinas sudah efisien karena berhasil guna, ekonomis, pelaksanaan kerja yang bisa kami pertanggungjawabkan, adanya pembagian kerja, rasionalitas tanggung jawab dan wewenang, serta adanya prosedur kerja yang praktis”.⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara bisa disimpulkan bahwa hanya kinerja manajerial di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan sudah berjalan efektif dan efisien. Hal tersebut bisa terlihat dari bagaimana Kepala Dinas mampu menerapkan fungsi dalam kinerja manajerial berkaitan dengan perencanaan, koordinasi, evaluasi, pengaturan staf, negoisasi, investigasi bahkan perwakilan dan pengawasan. Dimana fungsi-fungsi manajemen dalam kinerja manajerial sudah dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Kemudian, adanya penerapan partisipasi anggaran dan akuntansi pertanggungjawaban yang diterapkan oleh di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan semakin meningkatkan kinerja manajerial di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan.

Kemudian, kinerja manajerial di Dinas etahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan sudah efektif dan efisien karena sudah masuk ke dalam kategori efektif dan efisien.

⁶⁹ Adelia Frizky Arista, Bagian Keuangan, Wawancara Langsung, (1 April 2023).

Kinerja manajerial Dinas sudah efektif karena Dinas sudah menjelaskan tujuan yang hendak dicapai, strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan juga sudah jelas, analisa dan perumusan kebijakan yang dilakukan juga sudah mantap karena dipikirkan secara matang dan berkolaborasi dengan bagian lainnya, perencanaan yang Dinas buat juga sudah secara matang, melakukan penyusunan program secara tepat, sarana dan prasana yang ada di Dinas juga lengkap untuk menunjang kinerja para pegawai Dinas, pelaksanaan program kegiatan yang Dinas lakukan sudah efektif dan efisien, selain itu Dinas juga melakukan pengawasan dan pendalian yang mendidik dan baik. Kemudian, kinerja manajerial Dinas sudah efisien karena program kegiatan yang Dinas lakukan sudah berhasil guna, ekonomis, pelaksanaan kerja yang bisa kami pertanggungjawabkan, adanya pembagian kerja, rasionalitas tanggung jawab dan wewenang, serta adanya prosedur kerja yang praktis.

B. Temuan Penelitian

1. Penerapan Partisipasi Anggaran dalam Meningkatkan Kinerja Manajerial di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan

Fokus penelitian yang berkaitan dengan bagaimana penerapan partisipasi anggaran dalam meningkatkan kinerja manajerial di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan, peneliti mendapatkan temuan diantaranya yakni: Berdasarkan hasil paparan data, didapatkan temuan mengenai penerapan partisipasi anggaran dalam meningkatkan kinerja manajerial di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan dilaksanakan dengan cara:

- a. Atasan dan para bawahan ikut serta dalam penyusunan anggaran.
- b. Perasaan puas yang dirasakan dalam penyusunan anggaran mengenai alasan yang diberikan atasan pada saat terdapat revisi.
- c. Kebutuhan memberikan pendapat, yang mana atasan dan bawahan memberikan pendapat berupa saran ataupun masukan dalam penyusunan anggaran.
- d. Kerelaan memberikan pendapat, atasan dan bawahan memiliki kerelaan dalam memberikan pendapat dalam penyusunan anggaran.
- e. Mengusulkan pendapat ketika proses penyusunan anggaran terkait penetapan anggaran final.
- f. Atasan sering meminta pendapat saat penyusunan anggaran.

2. Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban dalam Meningkatkan Kinerja Manajerial di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan

Fokus penelitian yang berkaitan dengan bagaimana penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam meningkatkan kinerja manajerial di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan, peneliti mendapatkan temuan diantaranya yakni: Berdasarkan hasil paparan data, didapatkan temuan mengenai penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam meningkatkan kinerja manajerial di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan dilaksanakan dengan cara:

- a. Struktur organisasi, Dinas sudah menentukan dengan jelas batas wewenang dan tanggung jawab dari atasan, pengelompokan karyawan berdasarkan unit organisasi berdasarkan keahlian para karyawan, pimpinan mengetahui dengan jelas pembagian tugas tahunan hingga tanggung jawab yang di emban.

- b. Proses penyusunan anggaran sudah didasarkan pada pusat pertanggungjawaban, setiap sub bagian pertanggungjawaban berperan serta dalam penyusunan anggaran yang nantinya bisa membantu perencanaan, setiap penyiapan anggaran yang terjadi harus dilaporkan dan kemudian dalam mengevaluasi anggaran dilakukan perbandingan antara anggaran dan realisasinya.
- c. Melakukan penggolongan biaya kendali dan tidak terkendali, ada sistem pelaporan biaya yang bertanggung jawab dan didalamnya pelaporan pertanggungjawaban tersebut berisi informasi biaya yang dianggarkan dan biaya yang terjadi sesungguhnya yang kemudian dilakukan analisa dan evaluasi laporan pertanggungjawaban tersebut secara berkala dan rutin.

3. Pelaksanaan Kinerja Manajerial di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan

Fokus penelitian yang berkaitan dengan apakah pelaksanaan kinerja manajerial di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan efektif dan efisien, peneliti mendapatkan temuan diantaranya yakni: Berdasarkan hasil paparan data, didapatkan temuan mengenai pelaksanaan kinerja manajerial di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan sudah efektif dan efisien hal ini terlihat dari bagaimana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan mampu menerapkan fungsi-fungsi manajemen yang terdapat pada kinerja manajerial.

Dimana, fungsi-fungsi manajemen dalam kinerja manajerial tersebut berkaitan dengan perencanaan, koordinasi, evaluasi, pengaturan staf, negoisasi, investigasi bahkan perwakilan dan pengawasan yang dilaksanakan semaksimal mungkin. Kemudian tentunya didukung oleh adanya penerapan partisipasi anggaran dan akuntansi pertanggungjawaban yang membuat kinerja

manajerial di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan sudah efektif dan efisien.

Kemudian, kinerja manajerial di Dinas etahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan sudah efektif karena sudah memenuhi kategori efektif dan efisien. Kinerja manajerial Dinas sudah efektif karena Dinas sudah menjelaskan tujuan yang hendak dicapai dengan jelas, strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan juga sudah jelas, analisa dan perumusan kebijakan yang dilakukan juga sudah mantap karena dipikirkan secara matang dan berkolaborasi dengan bagian lainnya, perencanaan yang Dinas buat juga sudah secara matang, melakukan penyusunan program secara tepat, sarana dan prasana yang ada di Dinas juga lengkap untuk menunjang kinerja para pegawai Dinas, pelaksanaan program kegiatan yang Dinas lakukan sudah efektif dan efisien, selain itu Dinas juga melakukan pengawasan dan pendalian yang mendidik dan baik. Kemudian, kinerja manajerial Dinas sudah efisien karena program kegiatan yang Dinas lakukan sudah berhasil guna, ekonomis, pelaksanaan kerja yang bisa kami pertanggungjawabkan, adanya pembagian kerja, rasionalitas tanggung jawab dan wewenang, serta adanya prosedur kerja yang praktis.

C. Pembahasan

Pada sub pembahasan ini peneliti akan menggambarkan informasi yang diperoleh pada lapangan. Berikut merupakan pembahasan lebih lanjut berdasarkan hasil wawancara serta observasi yang peneliti lakukan dilapangan:

1. Penerapan Partisipasi Anggaran dalam Meningkatkan Kinerja Manajerial di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan

Partisipasi anggaran merupakan sebuah proses yang mana suatu individu tersebut terlibat serta memiliki pengaruh pada penyusunan anggaran yang kinerjanya tersebut akan dievaluasi

dan memungkinkan akan dihargai atas dasar pencapaian target anggaran mereka. Dengan adanya partisipasi anggaran maka akan membuat para pelaksana anggaran diharapkan bisa mengakibatkan efisiensi. Partisipasi anggaran dapat meningkatkan kinerja manajerial. Berkenaan dengan hal tersebut maka, penerapan partisipasi anggaran dalam meningkatkan kinerja manajerial di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan dilaksanakan dengan cara:

a. Ikut Serta dalam Penyusunan Anggaran

Kepala dinas dan jajarannya selalu ikut berpartisipasi dalam penyusunan anggaran. Keikutsertaan dalam penyusunan anggaran merupakan suatu hal yang penting. Dengan adanya keikutsertaan dalam penyusunan anggaran mengindikasikan bahwa suatu individu tersebut sudah terlibat atau berpartisipasi dalam penyusunan anggaran. Dengan adanya partisipasi anggaran yang ditandai dengan keikutsertaan dalam penyusunan anggaran ini dapat meningkatkan kinerja manajerial. Sebagaimana penyusunan anggaran di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten, yang mana penyusunan anggaran di Dinas sudah dibuat dengan sebagaimana mestinya (jujur), amanah, dapat dipertanggungjawabkan, dengan memperhatikan keadilan, kesejahteraan dan kebermanfaatan.

b. Kepuasan yang Dirasakan dalam Penyusunan Anggaran

Hal ini berkaitan dengan pada saat perencanaan anggaran atau penyusunan anggaran diberikan kepada atasan maka tentunya ada revisi. Dari adanya revisi tersebut apakah ada kepuasan yang dirasakan dalam penyusunan anggaran. Dari hasil wawancara dijelaskan bahwa kepuasan dalam penyusunan anggaran sangat dirasakan karena point pentingnya yakni target-target yang menjadi program dan skala prioritas secara keseluruhan tercapai dengan baik. Dengan adanya tingkat kepuasan yang dirasakan dalam penyusunan anggaran mengindikasikan

bahwa partisipasi suatu individu dalam penyusunan anggaran sudah dikatakan baik sehingga hal ini akan meningkatkan kinerja manajerial.

c. Kebutuhan Memberikan Pendapat

Pada dasarnya pendapat merupakan hal yang penting dan sangat diperlukan atau dibutuhkan dalam penyusunan anggaran. Pendapat tersebut bisa berbentuk saran ataupun masukan dalam penyusunan anggaran berkenaan dengan anggaran apa sajakah yang perlu dikeluarkan dan perlu menjadi prioritas dalam penyusunan anggaran. Pendapat yang berupa masukan ataupun saran tersebut dapat mengindikasikan bahwa suatu individu ikut berpartisipasi dalam penyusunan anggaran. Sehingga dengan adanya partisipasi anggaran yang ditandai dengan kebutuhan memberikan sebuah pendapat tersebut akan meningkatkan kinerja manajerial.

d. Kerelaan Memberikan Pendapat

Kerelaan memberikan pendapat yakni berkenaan dengan bagaimana suatu individu rela memberikan pendapat mereka tampak adanya unsur paksaan. Kerelaan dalam berikan pendapat ini merupakan hal yang penting untuk mewujudkan partisipasi mereka dalam penyusunan anggaran tanpa adanya paksaan. Dengan adanya kerelaan yang suatu individu lakukan ketika memberikan pendapat terkait penyusunan anggaran menunjukkan bahwa, individu tersebut sudah melakukan partisipasi anggaran dengan baik, sehingga hal ini bisa meningkatkan kinerja manajerial.

e. Usulan Ketika Proses Penyusunan Anggaran Terkait Penetapan Anggaran Final

Mengusulkan sebuah pemikiran ketika proses penyusunan anggaran terhadap penetapan anggaran final merupakan hal yang penting dalam meningkatkan kinerja manajerial. Hal ini bisa diwujudkan dengan mengusulkan sebuah pemikiran-pemikiran yang dianggap penting pada saat proses penetapan anggaran final. Di mana penetapan anggaran final tersebut harus disusun

dengan mendukung sasaran dan tujuan Dinas. Dengan adanya usulan sebuah pemikiran pemikiran dalam penetapan anggaran final menunjukkan bahwa suatu individu tersebut sudah ikut berpartisipasi dalam penyusunan anggaran sehingga hal ini bisa meningkatkan kinerja manajerial.

f. Atasan Sering Meminta Pendapat saat Penyusunan Anggaran

Seringnya atasan meminta pendapat pada saat penyusunan anggaran merupakan suatu hal yang penting yang bisa meningkatkan kinerja manajerial. Dengan adanya pendapat yang sering dimintai oleh atasan kepada bawahan akan menunjukkan bahwa sejarah keseluruhan semua individu yang terdapat dalam organisasi tersebut ikut berpartisipasi dalam penyusunan anggaran. Melalui hal ini tentunya akan mampu meningkatkan kinerja manajerial.

Partisipasi anggaran yang dilakukan oleh karyawan ketika proses penyusunan anggaran mengindikasikan bahwa seberapa besar tingkat keterlibatan aparat yang terlibat pada saat proses penyusunan anggaran, kesempatan untuk mengemukakan sebuah pendapat serta mengusulkan sebuah pemikiran.⁷⁰ Hal ini penting karena karyawan akan merasa produktif dan memperoleh kepuasan dalam penyusunan anggaran ketika mereka mendapatkan alasan-alasan yang baik dari atasan pada saat adanya revisi penyusunan anggaran. Salah satu kunci yang bisa menunjukkan suatu kinerja manajerial tersebut efektif yakni dengan adanya tujuan anggaran yang tercapai kemudian partisipasi dari bawahan mempunyai peran penting dalam mewujudkan tujuan.⁷¹

Untuk mewujudkan kinerja manajerial maka suatu organisasi bisa diukur dengan adanya partisipasi dalam melakukan penyusunan anggaran. Partisipasi anggaran memiliki hubungan yang erat dengan kinerja manajerial jika atasan bisa secara positif dan baik dalam merencanakan

⁷⁰ Hansen R Don dan Maryana M Mowen, *Akuntansi Manajerial*, 76.

⁷¹ Miftahul Jannah dan Sri Rahayu, "Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial SKPD dengan Kejelasan Sasaran Anggaran, Komitmen Tujuan Anggaran, Keadilan Distributif dan Pengawasan Internal Sebagai Variabel Intervening", *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, Vol. 3, No. 2 (2015), 69-90.

susunan anggaran. Pertimbangan efisiensi serta efektivitas dalam perencanaan anggaran memang sangat dibutuhkan supaya realisasi anggaran tersebut bisa sesuai berdasarkan apa yang diharapkan.⁷²

Nilai dasar Islam yang berkaitan dengan partisipasi anggaran, perencanaan dan realisasi anggaran ialah kejujuran (siddiq, amanah), pertanggung jawaban, keadilan, kesejahteraan dan kebermanfaatannya. Dalam melakukan pengelolaan anggaran, kewajiban yang harus dipenuhi ialah kejujuran (siddiq) berupa transparansi anggaran. Penerapan dari sifat siddiq juga berkaitan dengan amanah. Siddiq memiliki kaitan dengan akuntabilitas anggaran sedangkan amanah memiliki kaitan dengan alokasi dan distribusi anggaran kepada pihak yang berhak dalam mengimplementasikan nilai kesejahteraan, kemanfaatan dan pertanggung jawaban.⁷³

Sebagaimana yang tertera dalam surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri ataupun terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tau kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan hambanya untuk menegakkan keadilan. Dalam melakukan penyusunan anggaran harus dialokasikan untuk seluruh kelompok secara adil. Untuk pegawai pemerintahan harus disusun secara transparan dan akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan.

⁷² M. Nafarin, *Penganggaran Perusahaan*, 57.

⁷³ Nuryuliana, “Analisis Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Pegawai Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pegawai Kantor Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan)”, 41.

Sebagaimana partisipasi anggaran berkenaan dengan penyusunan anggaran di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten, yang mana penyusunan anggaran di Dinas sudah dibuat dengan sebagaimana mestinya (jujur), amanah, dapat dipertanggungjawabkan, dengan memperhatikan keadilan, kesejahteraan dan kebermanfaatan. Dengan adanya keikutsertaan antara atasan dengan para bawahan dalam proses penyusunan anggaran akan menciptakan transparansi artinya keterbukaan mengenai anggaran yang disusun dan Dinas bisa akuntabel atau amanah, adil dalam mengalokasikan dan mendistribusikan anggaran untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebermanfaatan serta dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, kepala Dinas, sekretariat Dinas dan bagian keuangan juga selalu mengawasi setiap proses dalam penyusunan anggaran ini. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kinerja manajerial.

2. Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban dalam Meningkatkan Kinerja Manajerial di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan

Akuntansi pertanggungjawaban merupakan sebuah sistem yang disusun dengan sedemikian rupa yang nantinya bisa mengumpulkan serta melaporkan biaya sekaligus pendapatan yang dilaksanakan berdasarkan pusat pertanggungjawaban dalam sebuah organisasi dengan tujuan supaya bisa ditunjuk orang ataupun kelompok yang bertanggung jawab terhadap penyimpangan dari biaya serta penghasilan yang dianggarkan. Penerapan akuntansi pertanggungjawaban ini bisa meningkatkan kinerja manajerial. Penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam meningkatkan kinerja manajerial di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan dilaksanakan dengan cara:

a. Struktur Organisasi yang Jelas

Berdasarkan struktur organisasi pada dasarnya, Dinas sudah menentukan dengan jelas batas wewenang dan tanggung jawab dari atasan, Dinas juga sudah melaksanakan pengelompokan

karyawan berdasarkan unit organisasi berdasarkan keahlian para karyawan. Pimpinan juga mengetahui dengan jelas pembagian tugas tahunan hingga tanggung jawab yang di emban.

Struktur organisasi memberikan gambaran terkait aliran tanggung jawab, posisi serta wewenang yang jelas pada setiap unit kerja. Kemudian struktur organisasi juga memberikan gambaran terkait pembagian tugas dengan jelas. Suatu organisasi tersebut disusun dengan demikian rupa sehingga wewenang dan tanggung jawab setiap pimpinan menjadi jelas.⁷⁴

b. Anggaran yang Disusun Berdasarkan Pusat Pertanggungjawaban

Proses penyusunan anggaran sudah didasarkan pada pusat pertanggungjawaban. Setiap sub bagian pertanggungjawaban berperan serta dalam penyusunan anggaran yang nantinya bisa membantu perencanaan, setiap penyiapan anggaran yang terjadi harus dilaporkan dan kemudian dalam mengevaluasi anggaran dilakukan perbandingan antara anggaran dan realisasinya. Laporan tersebut dilaporkan dengan sebenar-benarnya, yaitu Dinas selalu berusaha menerapkan sifat jujur dan amanah dalam menyampaikan semua informasi dan keterangan terkait anggaran berdasarkan fakta yang ada tanpa adanya pemalsuan data, penipuan ataupun pembodohan publik. Karena pada dasarnya pertanggungjawaban bukan hanya kepada pemerintah saja tapi kepada Allah yang Maha mengetahui atas segala sesuatu. Kemudian laporan tersebut akan dievaluasi setiap bulan baik serapan anggaran dan pertanggungjawaban sejauh mana perbandingan antara anggaran dan realisasi.

Pada dasarnya setiap pusat pertanggungjawaban tentunya harus ikut serta ketika proses penyusunan anggaran. Anggaran tersebut termasuk gambaran rencana kerja para aparatur yang akan dilakukan. Dalam proses penyusunan anggaran tentunya harus terdapat sebuah laporan dan perlu adanya evaluasi untuk membandingkan realisasi serta anggaran. Laporan

⁷⁴ Rudianto, *Akuntansi Manajemen*, 190.

pertanggungjawaban untuk tiap pusat biaya setiap bulan tentunya harus dilaporkan terkait laporan rekapitulasi biaya yang tersaji dalam laporan pertanggungjawaban.⁷⁵

c. Melakukan Penggolongan Biaya

Dinas sudah melakukan penggolongan biaya kendali dan tidak terkendali, Dinas juga ada sistem pelaporan biaya yang bertanggung jawab dan didalamnya pelaporan pertanggungjawaban tersebut berisi informasi biaya yang dianggarkan dan biaya yang terjadi sesungguhnya yang kemudian dilakukan analisa dan evaluasi laporan pertanggungjawaban tersebut secara berkala dan rutin.

Penggolongan biaya perlu dilakukan dengan menggolongkan biaya terkendali dan tidak terkendali. Pemisahan biaya terkendali dan tidak terkendali tersebut perlu dilaksanakan dalam akuntansi pertanggungjawaban. Adanya sistem pelaporan biaya serta melaporkan ke dalam laporan pertanggungjawaban yang memuat tentang informasi biaya yang dianggarkan serta realisasi merupakan hal yang penting dalam akuntansi pertanggungjawaban. Setelah adanya laporan terkait biaya ini maka perlu adanya analisa serta evaluasi laporan pertanggungjawaban.⁷⁶

Akuntansi pertanggungjawaban ini berkaitan dengan sistem yang terdapat pada sebuah organisasi yang mana sistem tersebut mengukur aktivitas serta kinerja manajerial. Keberhasilan pimpinan dalam memimpin sebuah organisasi tentunya bisa terlihat dari dasar biaya yang terjadi, pendapatan yang didapat, selisih pendapatan dengan biaya, hingga investasi pada unit pusat pertanggungjawaban yang dipimpin.⁷⁷ Akuntansi pertanggungjawaban bisa meningkatkan kinerja manajerial karena akuntansi pertanggungjawaban ini bisa digunakan oleh seorang pimpinan sebagai sebuah alat perencanaan pada tiap unit usaha, sebagai pedoman untuk

⁷⁵ Rudianto, *Akuntansi Manajemen*, 190.

⁷⁶ Ibid.

⁷⁷ Anthony N Robert dan Vijay Govindarajan, *Sistem Pengendalian Manajemen*, 130.

mewujudkan sasaran perusahaan, sebagai tolak ukur ketika penilaian kinerja, bahkan bisa membantu mengendalikan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.⁷⁸

Akuntansi pertanggungjawaban dalam Islam lebih ditekankan pada tanggungjawab manusia terhadap perbuatannya kepada sang pencipta. Akuntan bertanggungjawab melaporkan semua transaksi yang terjadi dengan benar, jujur serta teliti, sesuai dengan syariah Islam dan bersifat amanah.⁷⁹ Sifat amanah ini dijelaskan dalam surah al-Qashas ayat 26:

قَالَتْ إِحَدُهُمَا يَتَأْتِيَ اسْتَجْرَهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.

Berdasarkan ayat di atas, dapat dijelaskan bahwa manusia harus memiliki sifat dapat dipercaya. Oleh karna itu, seorang akuntan yang memberikan informasi keuangan yang didalamnya terdapat pemalsukan data, penipuan, dan pembodohan dianggap sebagai penghianat terhadap amanah yang telah diterimannya sebagai orang yang telah dipercaya untuk menyusun data akhir tahun dan neraca keuangan. Hal tersebut juga diperkuat oleh surah al-Israk ayat 36:⁸⁰

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ

عَنْهُ مَسْنُورًا ﴿٣٦﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban.”

Berdasarkan ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban manusia tidak hanya dilaporkan kepada manusia, tetapi juga kepada Allah SWT. Dalam islam, akuntansi

⁷⁸ Rudianto, *Akuntansi Manajemen*, 75.

⁷⁹ Ana Mariana, “Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Pusat Laba Dalam Persepektif Ekonomi Islam (Studi Pada PT Aprisindo Kedaton Bandar Lampung)”, 32-33.

⁸⁰ Ana Mariana, “Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Pusat Laba Dalam Persepektif Ekonomi Islam (Studi Pada PT Aprisindo Kedaton Bandar Lampung)”, 32-33.

pertanggungjawaban lebih mengarah kepada tanggungjawab seorang manusia kepada sang penciptanya Allah SWT. Memiliki sifat yang amanah dan jujur merupakan sifat yang harus dimiliki oleh seorang akuntan, baik dari mencatat ataupun membuat laporan tetap harus berpegang teguh terhadap kejujuran dan kebenaran.⁸¹

Sebagaimana penerapan akuntansi pertanggung di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan, laporan akuntansi pertanggungjawaban tersebut dilaporkan dengan sebenar-benarnya dan teliti, yaitu Dinas selalu berusaha menerapkan sifat jujur dan amanah dalam menyampaikan semua informasi dan keterangan terkait anggaran berdasarkan fakta yang ada tanpa adanya pemalsuan data, penipuan ataupun pembodohan publik. Karena pada dasarnya pertanggungjawaban bukan hanya kepada pemerintah saja tapi kepada Allah yang Maha mengetahui atas segala sesuatu. Kemudian laporan tersebut akan dievaluasi setiap bulan baik serapan anggaran dan pertanggungjawaban sejauh mana perbandingan antara anggaran dan realisasi tersebut.

3. Pelaksanaan Kinerja Manajerial di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan

Kinerja manajerial bisa diartikan sebagai kinerja para individu dalam anggota organisasi dalam aktivitas manajerial yang berkaitan dengan perencanaan, koordinasi, evaluasi, pengaturan staf, negosiasi, investigasi, perwakilan dan pengawasan. Pelaksanaan kinerja manajerial di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan sudah efektif dan efisien. Efektif dapat diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik (tepat sasaran), dikatakan efektif apabila tujuan ataupun sasaran yang sudah ditentukan tercapai.⁸² Kategori efektif yaitu kejelasan

⁸¹ Nadia Anggraini Ritongga, "Pengaruh Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Pengendalian Biaya Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Silaupiasa", 28.

⁸² Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, 7.

tujuan yang hendak dicapai, kejelasan strategi pencapaian tujuan, proses analisa dan perumusan kebijakan yang mantap, perencanaan yang matang, penyusunan program yang tepat, tersedianya sarana dan prasarana, pelaksanaan yang efektif dan efisien, sistem pengawasan dan pengendalian yang mendidik.⁸³

Sementara efisien merupakan cara untuk mencapai tujuan yang maksimal melalui penghematan sumber daya seperti biaya, waktu dan usaha dengan melakukan pekerjaan dengan benar.⁸⁴ Kategori dari efisien yaitu berhasil guna, ekonomis, pelaksanaan kerja yang dapat dipertanggungjawabkan, pembagian kerja yang nyata, rasionalitas wewenang serta tanggung jawab dan prosedur kerja yang praktis.⁸⁵

Kinerja manajerial di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan sudah efektif dan efisien yang bisa dari bagaimana Dinas mampu menerapkan fungsi-fungsi manajemen yang terdapat pada kinerja manajerial, mampu menerapkan partisipasi anggaran, mampu menerapkan akuntansi pertanggungjawaban dan sudah efektif karena sudah memenuhi kategori efektif dan efisien. Dimana, fungsi-fungsi manajemen dalam kinerja manajerial tersebut berkaitan dengan:

a. Perencanaan

Perencanaan berkaitan dengan pemilihan kebijakan, program, strategi bahkan prosedur untuk mewujudkan tujuan suatu organisasi. Perencanaan membutuhkan penetapan tujuan dan indentifikasi sebuah strategi untuk mewujudkan tujuan.⁸⁶ Dalam aspek perencanaan, tentunya aparat Dinas sudah ikut serta dalam aktivitas perencanaan tersebut dengan berkontribusi dalam menentukan sebuah tujuan kebijakan, rencana aktivitas, jadwal kerja, penyusunan anggaran,

⁸³ Donni Juni Priasa dan Agus Gamida, *Manajemen Perkantoran, Efektif, Efisien dan Profesional*, 14-15.

⁸⁴ Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, 7.

⁸⁵ Donni Juni Priasa dan Agus Gamida, *Manajemen Perkantoran, Efektif, Efisien dan Profesional*, 16-17.

⁸⁶ Rudianto, *Akuntansi Manajemen*, 195.

program bahkan membuat perencanaan operasional. Perencanaan tersebut sudah bisa dikatakan efektif serta efisien karena atasan serta bawahan ikut terlibat dalam proses perencanaan dari aspek partisipasi anggaran serta akuntansi pertanggungjawaban.

Dikatakan efektif yaitu tujuan yang Dinas capai sudah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan atau tepat sasaran misalnya dalam penyusunan anggaran yang sudah tepat sasaran. Selain itu dikatakan efisien, dimana dalam mewujudkan tujuan atau sasaran yang Dinas tetapkan, Dinas sudah berusaha meminimalisir pengeluaran sumber daya seperti biaya, waktu dan tenaga. Misalnya rencana anggaran untuk pembangunan prasarana pertanian, Dinas sudah menetapkan perencanaan anggaran untuk prasarana dan sudah tepat sasaran dan Dinas juga meminimalisir sumber daya misalnya membeli produk untuk bahan pembangunan yang terjangkau dengan kualitas yang bagus, berusaha agar pembangunan bisa selesai secepat mungkin dan memperkerjakan tukang bangunan profesional sebanyak 6 orang dengan target pembangunan bisa selesai secepat mungkin.

b. Koordinasi

Setiap fungsi manajerial yakni terdapat sebuah pelaksanaan koordinasi. Koordinasi ini bisa dilaksanakan melalui pertukaran informasi dengan bagian organisasi lain untuk menghubungkan serta menyesuaikan sebuah program kemudian memberikan informasi pada departemen lain dan berhubungan dengan manajer lain.⁸⁷ Dalam hal ini, aparat Dinas sudah melakukan koordinasi dengan saling bertukar informasi, menyesuaikan laporan kemudian saling bekerja sama dengan bagian lain untuk bertukar informasi serta mendapatkan informasi. Dengan adanya koordinasi tentunya bisa menyesuaikan sebuah laporan serta melakukan kerjasama dengan bagian lain dalam rangka mendapatkan apapun menukar informasi yang diperlukan untuk keberlanjutan program ataupun tujuan organisasi. Koordinasi yang Dinas lakukan sudah efektif dan efisien,

⁸⁷ Rudianto, *Akuntansi Manajemen*, 195.

dimana Dinas sudah membuat perencanaan yang matang, menyamakan persepsi, memahami materi yang diicarakan, saling terbuka, saling menghargai, meminta umpan balik dan memberikan motivasi.

c. Evaluasi

Evaluasi termasuk salah satu fungsi pokok manajemen yang digunakan untuk menilai serta mengukur kinerja pegawai, catatan, laporan keuangan hingga proposal.⁸⁸ Dalam aspek evaluasi ini Kepala Dinas sudah berperan dalam melakukan evaluasi dengan menilai kinerja serta mengukur hasil kinerja para bawahan ataupun karyawan. Dalam hal ini, Kepala Dinas, Sekretariat dan bagian keuangan memiliki peran untuk melaksanakan evaluasi, melaksanakan penilaian kinerja sekaligus melaksanakan pengukuran hasil kerja bawahan. Maka, dapat dikatakan bahwa evaluasi, penilaian kinerja dan pengukuran hasil kerja sudah efektif dan efisien karena Dinas sudah menentukan perencanaan, menetapkan metode, melaksanakan evaluasi, mengolah dan menganalisis data hasil evaluasi, menilai kinerja dan pengukuran hasil kerja yang efektif dan efisien dengan jelas dan dapat ditindaklanjuti.

d. Pengaturan staf

Pengaturan staf termasuk faktor penting dalam pengelolaan sumber daya manusia supaya karyawan bisa bermanfaat dengan efektif. Pengaturan staf ini berkaitan dengan spesifikasi pekerjaan, spesifikasi pekerja, seleksi kemudian penyusunan organisasi hingga pergerakan tenaga untuk melatih sekaligus menyiapkan karyawan supaya melakukan pekerjaan secara baik.⁸⁹ Berkaitan dengan pengaturan staf, Kepala Dinas sudah berperan penting ketika melakukan pengelolaan serta mengatur pegawai, melakukan seleksi hingga promosi karyawan karena hal tersebut menjadi wewenang Kepala Dinas. Penempatan staf tersebut juga dibuat berdasarkan

⁸⁸ Rudianto, *Akuntansi Manajemen*, 195-196.

⁸⁹ Rudianto, *Akuntansi Manajemen*, 195-196.

kemampuan dan minat karyawan. Pengaturan staf ini yakni sebuah proses yang memuat spesifikasi pekerjaan, pergerakan tenaga, spesifikasi, pekerja, seleksi dan penyusunan organisasi yang digunakan untuk melatih dan mempersiapkan karyawan supaya bisa melakukan pekerjaan mereka dengan baik.

Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa pengelolaan karyawan, seleksi dan promosi karyawan sudah efektif dan efisien. Karena pengelolaan karyawan yang Dinas lakukan sudah berusaha meningkatkan keterampilan karyawan, meningkatkan profesionalisme, meningkatkan kualitas kerja, solidaritas tim, menerapkan metode pengelolaan sumber daya manusia berdasarkan kebutuhan, dan melakukan dokumentasi serta pertemuan rutin. Selain itu dalam seleksi, Dinas sudah menentukan kebutuhan, menyebarkan informasi lowongan, melakukan seleksi berkualitas, wawancara efektif, referensi dan verifikasi, menilai budaya organisasi, mengambil keputusan, onboarding yang baik, evaluasi dan umpan balik. Dalam promosi jabatan, Dinas sudah mempertimbangkan beberapa hal seperti loyalitas, motivasi, kemampuan manajemen, komunikasi dan solutif.

e. Negoisasi

Negoisasi diperlukan untuk memperbaiki komunikasi karena pada dasarnya pelaksanaan komunikasi tidak selalu berjalan efektif.⁹⁰ Berkaitan dengan negoisasi, Dinas sudah melakukan negoisasi berkaitan dengan kontrak untuk barang ataupun jasa yang dibutuhkan kemudian juga melakukan negoisasi ketika melaksanakan aktivitas dengan pihak luar. Dalam melakukan negoisasi terkait kontrak untuk pengadaan barang ataupun jasa yang diperlukan yaitu dengan melaksanakan negoiasi sesuai dengan pengadaan Perpres No. 12 tahun 2021 dan harus sesuai dengan regulasi yang berlaku. Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa negoisasi yang kami

⁹⁰ Rudianto, *Akuntansi Manajemen*, 197.

lakukan sudah efektif dan efisien karena didasarkan pada Perpres No. 12 tahun 2021 dan regulasi yang berlaku.

f. Investigasi

Untuk menyusun sebuah laporan tentunya diperlukan sebuah fungsi manajemen investigasi, yang mana manajemen memiliki tugas untuk menyampaikan serta mengumpulkan informasi berbentuk catatan laporan serta menentukan analisa pekerjaan.⁹¹ Dari aspek investigasi aparatur Dinas sudah mengumpulkan serta menyiapkan informasi berupa catatan ataupun laporan dan dilaporkan dengan tepat waktu. Pengumpulan dan penyiapan informasi sebagai bahan laporan penting untuk disampaikan tepat waktu karena sangat dibutuhkan untuk kepentingan pihak Dinas serta pemerintah. Sehingga dapat dikatakan bahwa investigasi di Dinas sudah efektif dan efisien karena pengumpulan, penyiapan informasi berupa laporan dan penyampaian laporan sudah tepat waktu dengan dilakukan secara cermat dan seksama.

g. Perwakilan

Perwakilan merupakan fungsi manajemen untuk menghadiri pertemuan dengan perkumpulan bisnis, menyampaikan sebuah visi dan misi, pidato serta promosi tujuan umum perusahaan.⁹² Dari aspek perwakilan, tentunya Dinas sudah menyampaikan visi, misi, aktivitas organisasi dengan berkomunikasi, melaksanakan konsultasi, promosi untuk tujuan umum organisasi pada pihak luar. Visi serta misi tersebut sudah tercantum dalam rencana strategis pembangunan Dinas. Sehingga dapat dikatakan bahwa perwakilan di Dinas sudah efektif dan efisien.

h. Pengawasan

⁹¹ Ibid.

⁹² Rudianto, *Akuntansi Manajemen*, 198.

Pengawasan merupakan pengukuran serta pembetulan terkait aktivitas bawahan untuk menjamin apa yang ditetapkan bisa terlaksana dengan baik.⁹³ Berdasarkan aspek pengawasan, tentunya Dinas sudah melaksanakan pengukuran serta pembetulan terkait aktivitas bawahan untuk memberikan jaminan apakah pelaksanaan tersebut sudah sesuai berdasarkan apa yang direncanakan. Pengawasan ini terdiri dari aktivitas mengarahkan, memimpin serta mengembangkan bawahan, membimbing, melatih, memberikan tugas dan menangani keluhan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengawasan di Dinas sudah efektif dan efisien pengawasan yang Dinas lakukan sudah akurat, tepat waktu, objektif dan menyeluruh, terpusat pada titik pengawasan strategik, realistis secara ekonomis dan organisasional, terkoordinasi dengan aliran organisasi, fleksibel, bersifat petunjuk dan operasional serta diterima para anggota di Dinas.

Berdasarkan fungsi manajerial yang sudah dilaksanakan dengan baik pada setiap indikator kinerja manajerial, maka menunjukkan bahwa kinerja manajerial di Dinas sudah efektif dan efisien. Hal itu terlihat dari bagaimana Dinas mampu melakukan fungsi dalam kinerja manajerial dengan efektif dan efisien dari aspek perencanaan, koordinasi, evaluasi, pengaturan staf, negosiasi, investigasi, perwakilan dan pengawasan.

Adanya penerapan partisipasi anggaran dan akuntansi pertanggungjawaban yang juga mampu mewujudkan kinerja manajerial di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan berjalan efektif dan efisien. Dengan adanya partisipasi anggaran, maka kinerja manajerial akan meningkat karena dengan adanya partisipasi anggaran maka atasan dan para bawahan akan ikut terlibat dalam proses penyusunan anggaran.⁹⁴ Dengan penerapan akuntansi pertanggungjawaban, maka sebagai seorang pimpinan, akuntansi pertanggungjawaban bisa

⁹³ Ibid.

⁹⁴ Miftahul Jannah dan Sri Rahayu, "Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial SKPD dengan Kejelasan Sasaran Anggaran, Komitmen Tujuan Anggaran, Keadilan Distributif dan Pengawasan Internal Sebagai Variabel Intervening", 69-90.

dipergunakan sebuah alat perencanaan pada tiap unit usaha, sebagai pedoman untuk mewujudkan sasaran perusahaan, sebagai tolak ukur ketika penilaian kinerja, bahkan bisa membantu mengendalikan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.⁹⁵

Selain itu, kinerja manajerial di Dinas Petahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan sudah efektif karena sudah memenuhi beberapa kategori efektif dan efisien. Kinerja manajerial Dinas sudah efektif karena Dinas sudah menjelaskan tujuan yang hendak dicapai, strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan juga sudah jelas, analisa dan perumusan kebijakan yang dilakukan juga sudah mantap karena dipikirkan secara matang dan berkolaborasi dengan bagian lainnya, perencanaan yang Dinas buat juga sudah secara matang, melakukan penyusunan program secara tepat, sarana dan prasana yang ada di Dinas juga lengkap untuk menunjang kinerja para pegawai Dinas, pelaksanaan program kegiatan yang Dinas lakukan sudah efektif dan efisien, selain itu Dinas juga melakukan pengawasan dan pendalian yang mendidik dan baik. Kemudian, kinerja manajerial Dinas sudah efisien karena program kegiatan yang Dinas lakukan sudah berhasil guna, ekonomis, pelaksanaan kerja yang bisa kami pertanggungjawabkan, adanya pembagian kerja, rasionalitas tanggung jawab dan wewenang, serta adanya prosedur kerja yang praktis.

Manusia adalah makhluk Tuhan paling sempurna paling sempurna yang diciptakan oleh Allah SWT, apabila memposisikan pekerjaannya dalam dua konteks, yaitu kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, maka hal itu disebut rezeki dan berkah serta hasil pekerjaan yang baik adalah yang dikerjakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ajaran-ajaran Rasulullah Saw. Firman Allah dalam Al-Quran Surat An-Nahl: 93:⁹⁶

⁹⁵ Rudianto, *Akuntansi Manajemen*, 75.

⁹⁶ Rifki Prayoga Gunawan, "Analisis Pengaruh Upah Terhadap Kinerja Pegawai Harian Lepas Dalam Perspektif Ekonomi Islam", 39.

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ
وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾

Artinya : “Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan”.

Berdasarkan ayat di atas, dijelaskan bahwa segala sesuatu yang dikerjakan oleh manusia kelak akan dipertanyakan. Kinerja ialah kesuksesan seseorang di dalam melaksanakan pekerjaan. Sejauh mana keberhasilan seseorang atau organisasi dalam menyelesaikan pekerjaannya disebut *level of performance*. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ahqaaf ayat 19 yaitu:⁹⁷

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٠﴾

Artinya: “Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan”.

Dari ayat tersebut bahwasanya Allah pasti akan membalas setiap amal perbuatan manusia berdasarkan apa yang telah mereka kerjakan. Artinya jika seseorang melaksanakan pekerjaan dengan baik dan menunjukkan kinerja yang baik bagi organisasinya, maka ia akan mendapat hasil yang baik pula dari kerjanya dan akan memberikan keuntungan bagi organisasinya.

Sebagaimana kinerja manajerial di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan yang sudah efektif dan efisien. Hal itu terlihat dari bagaimana Dinas mampu menerapkan fungsi kinerja manajerial, partisipasi anggaran dan akuntansi pertanggungjawaban secara efektif dan efisien. Kemudian, kinerja manajerial di Dinas Petahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan sudah efektif karena sudah masuk ke dalam kategori efektif dan efisien.

⁹⁷ Rifki Prayoga Gunawan, “Analisis Pengaruh Upah Terhadap Kinerja Pegawai Harian Lepas Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, 39.

Selain itu, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan bekerja atau berusaha yang mengikuti kaidah-kaidah syariat Islam. Dimana, Dinas sudah berusaha menerapkan sifat amanah dalam bekerja yang terdiri atas profesional, jujur, ibadah dan amal perbuatan serta mendalami agama dan profesi terdiri atas memahami tata nilai agama, dan tekun bekerja. Oleh karenanya, dengan penerapan partisipasi anggaran dan akuntansi pertanggungjawaban, kinerja manajerial di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan menjadi efektif dan efisien.